Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010 For Evaluation Only.

ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN MAMASA

TESIS

Program Studi Administrasi Pembangunan



Oleh

SAMBOLANGI

P 0804216008

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2018

TESIS

ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN MAMASA

Disusun dan diajukan oleh

SAMBOLANGI

Nomor Pokok P0804216008

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 16 Agustus 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui Komisi Penasihat

1 255Ch

Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si.

Dr. H. Muhammad Yunus, M.A.

Ketua

Anggota

Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan, Plh. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

Dr. H. Muhammad Yunus, M.A.

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga Tesis yang berjudul "Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Mamasa" ini, dapat penulis selesaikan.

Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk usul, saran ataupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya.

Pada kesempatan yang baik ini pula, penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta bapak **Benyamin** dan ibu **Limbongbisara** yang tidak pernah lelah memberikan semangat, motivasi dan untaian doa yang tiada henti serta dukungan moral maupun material sehingga penulis sampai pada jenjang ini, anya, **Rezeki Lestari** wanita cantik yang selalu jadi motovasi penulissemoga Tuhan membalas semua kebaikannya, serta ucapan terimakasih kepada:

Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas
 Hasanuddin

- 2) Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- 3) Dr.Muhammad Yunus, M.A., sebagai Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan PascaSarjana Universitas Hasanuddin Makassar
- 4) Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si., sebagai Ketua Kosentrasi Administrasi
 Pemerintahan Daerah Program Studi Administrasi Pembangunan
 PascaSarjana Universitas Hasanuddin Makassar
- Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si sebagai pembimbing 1 dan Dr. H. Muhammad Yunus, MA. Selaku pembimbing 2 ,atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan mulai dari awal penyusunan proposal hingga selesainya penelitian ini.
- 6) Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si, Dr. Indar Arifin, M. Si, dan Dr. Hj. Nurlinah. M, M.Si. sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan saran dalam perbaikan pada tesis ini.
- 7) Para dosen-dosen PPs Administrasi Pembangunan Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah dan seluruh staf karyawan Fisip Unhas atas bantuannya selama penulis menempuh pendidikan.

8) Pemerintah Kabupaten Mamasa khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa yang selalu bersedia mengarahkan dan membimbing penulis selama penelitian ini berlangsung beserta seluruh stafnya.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam Tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin!

Makassar, 16 Agustus 2018

Penulis

ABSTRAK

SAMBOLANGI. Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Mamasa (dibimbing oleh Rasyid Thaha dan Muhammad Yunus)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dan Strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Mamasa.

Penelitian ini diadakan di Kabupaten Mamasa khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa . Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun fokus penelitian adalah mengidentifikasi factor internal dan eksternal dinas pariwisata dan strategi pengembangan Pariwisata di kabupaten Mamasa .

Hasil penelitian ini menunjukkan strategi yang digunakan oleh dinas pariwisata menurut pendekatan Mintzberg adalah Strategi sebagai Rencana dengan melihat Dinas Pariwisata secara sadar menyusun Program, Kebijakan dan Tujuan. Strategi yang dilakukan adalah strategi pengembangan produk wisata, strategi promosi dan pemasaran, strategi pengembangan sarana dan prasaraana, dan faktor penghambat adalah lemahnya sumberdaya manusia dan anggaran yang tersedia belum cukup.

Kata Kunci : Strategi, Pengembangan Destinasi, Pariwisata

\

ABSTRACT

SAMBOLANGI. Analysis of Tourism Development Strategy of Mamasa Regency (Supervised by Rashid Thaha and Muhammad Yunus)

The aims of the study were to identify internal and external factors and tourism development strategy of Mamasa Regency.

This research was conducted in Mamasa Regency especially Mamasa Regency Tourism Office. The research method used is descriptive qualitative approach. The focus of the research is to identify internal and external factors of tourism and tourism development in Mamasa regency.

The results of this study indicate that the strategy used by Mamasa district tourism service according to Mintzberg's approach is the Strategy as a Plan by seeing the Tourism Office consciously formulating Programs, Policies, and Objectives. The strategies adopted are tourism product development strategies, promotion and marketing strategies, infrastructure development strategies, and the inhibiting factors are weak human resources and insufficient available budgets.

Keywords: Strategy, Destination Development, Tourism

DAFTAR ISI

			Hal.
Hala	ıman S	Sampul	i
Daft	ar Isi		ii
Daft	ar Tab	el	iii
Daft	ar Gan	nbar	iv
Intis	ari		V
Abs	tract		vi
Вав	I PEN	DAHULUAN	
	1.2	Latar Belakang Penelitian	1
	1.3	Rumusan Masalah	5
	1.4	Tujuan Penelitian	6
	1.5	Manfaat Penelitian	6
Вав	II Tu	NJAUAN PUSTAKA	
	2.1	Konsep Pariwisata	7
	2.3	Konsep Kepariwisataan	10
	2.3	Konsep Pengembangan Pariwisata	15
	2.4	Tinjauan Pariwisata dalam penyelenggaraan Otonomi	
		Daerah	25
	2.5	Konsep Strategi	28
	2.6	Proses Manajemen Strategis	42
	2.7	Dimensi Strategi	55
	2.8	Penelitian Terdahulu	57
	29	Kerangka Pikir	61

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Lokas	i Penelitian	63
3.2.	Tipe F	Penelitian	63
3.3.	Data	dan Teknik Pengumpulan Data	64
	3.3.1.	Sumber Data	64
	3.3.2.	Teknik Pengumpulan Data	64
3.4.	Inform	nan Penelitian	65
3.5.	Analis	is Data	66
3.6.	Fokus	Penelitian	66
BARIV H	lasii F	PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	.,,,,,,,		
4.1.	Gamb	aran Umum Kabupaten Mamasa	68
	4.1.1	Sejarah Singkat Kabupaten Mamasa	68
	4.1.2	Keadaan Geografis	73
	4.1.3	Keadaan Iklim dan Cuaca	77
	4.1.4	Keadaan Sosial Budaya	78
	4.1.5	Keadaan Demografi	78
	4.1.6	Visi Misi Kabupaten Mamasa	81
	4.1.7	Gambaran Umum Dinas Pariwisata	
		Kabupaten Mamasa	86
	4.1.8	Sumber Daya Manusia pada Dinas Pariwisata	
		Kabupaten Mamasa	89
	4.1.9	Potensi Pariwisata Kabupaten Mamasa	92
4.2	Strate	gi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Mamasa	96
	4.2.1	Strategi pengembangan produk wisata	104
	4.2.2	Strategi Pemasaran dan Promosi	116
	4.2.3	Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana	122

	4.3	Faktor- faktor Penghambat Strategi	
		Pengembangan Pariwisata Kabupaten Mamasa	131
		4.3.1 Sumber Daya Manusia	132
		4.3.2 Anggaran	132
BAE	s V P	ENUTUP	
	5.1.	Kesimpulan	133
	5.2.	Saran	134

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Strategi dan Kesesuaian	42
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir	63
Gambar 4.1 Persentase Luas Wilayah Kecamatan	
terhadap Luas Kabupaten	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.1 Posisi dan Tinggi Wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa	74
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamasa Tahun 2014	79
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Eselon	89
Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Distribusi pada Bidang dan Sekretariat	90
Table 4.5 Jumlah Pengawai Kontrak Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan	91
Tabel 4.6 Objek Wisata Potensial Kabupaten Mamasa	95
Tabel 4.7 Jumlah kunjungan wistawan Kabupaten Mamasa	107
Tabel 4.8 Skor Evaluasi Potensi Daya Tarik Wisata di Kecamatan Mamasa	108
Tabel 4.9 Skor Evaluasi Potensi Taya Tarik Wisata di Kecamatan Tawalian	109
Tabel 4.10 Skor Evaluasi Potensi Daya Tarik Wisata di Kecamatan Sesenapadang	110
Tabel 4.11 Skor Evaluasi Potensi Daya Tarik Wisata di Kecamatan Sumarorong	111
VELVOVALITATAL DULLATIVIVIV	1 1 1

Tabel 4.12 Skor Evaluasi Potensi Daya Tarik Wisata					
di Kecamatan Bambang	112				
Tabel 4.13 Jumlah kunjungan wistawan Kabupaten Mamasa					
Tahun 2011-2015	128				
Tabel Matriks 4.14 Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten					
Mamasa	128				
Tabel Matriks 4.14 Faktor Penghambat Strategi Pengembangan					
Pariwisata Kabupaten Mamasa	134				

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Salah satu yang merasakan dampak dari kebijakan ini yakni di bidang pariwisata vang mengakibatkan pergeseran tugas. fungsi kewenangan dalam bidang pariwisata. Oleh karena itu perubahan paradigma dalam kebijakan pariwisata juga harus disikapi dan disesuaikan oleh daerah.

Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Pasal 6: Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata). Pasal 8: 1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. 2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 11: Pemerintah bersama lembaga yang kepariwisataan menyelenggarakan terkait dengan penelitian pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.) serta (Pasal 12: 1) Aspek- aspek penetapan kawasan strategis pariwisata). Pembangunan keparawisataan sangat tergantung dari keberhasilan pembangunan sektor lain, baik pemerintah, swasta Perencanaan pembangunan maupun masyarakat. keparawisataan menghendaki pendekatan terpadu dengan sektor-sektor lainnya yang berkaitan dengan bidang keparawisataan. Oleh karaena itu pengembangan bidang keparawisataan di suatu daerah haruslah dibawah kordinasi perencanaan fisik daerah tersebut secara keseluruhan. (Yoeti 13 : 1997) Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pengembangan keparawisataan agar program pengembangan parawisata yang akan dilaksanakan dapat menciptakan kegiatan antar sektor dan ketimpangan kepentingan selanjutnya tidak teriadi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap lingkungan sosial.

Pembangunan dalam lanskap makro di Provinsi Sulawesi Barat, dilakukan pembagian peran dan fokus pembangunan antar-region. Wilayah Kabupaten Mamuju dan sekitarnya diandalkan menjadi pusat pemerintahan Provinsi Sulbar, Kabupaten Majene diproyeksikan sebagai kota pendidikan, Kabupaten Polewali sebagai pusat pengembangan ekonomi dan perdagangan. Sementara Kabupaten Mamasa akan

diandalkan menjadi "Kota Pariwisata". Untuk menopang rencana itu, pemerintah Provinsi Sulbar telah memberikan dukungan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Kabupaten Mamasa Sebagai destinasi Pariwisata Unggulan. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini telah menetapkan Kabupaten Mamasa sebagai destinasi wisata Sulbar, kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten Mamasa melalui peraturan daerah nomor 3 tahun 2017.

Kabupaten Mamasa Kabupaten Mamasa adalah salah satu kota kecil di provinsi Sulawesi Barat dengan bentangan panorama alamnya yang indah dan eksotis, berhawa sejuk, flora dan fauna, seni budaya lokal, peninggalan purbakala, dan wisata buatan merupakan potensi wisata yang sangat menarik. Keberadaan objek wisata bisa dipungkiri adalah modal utama dalam memacu pertumbuhan wisata ke depan. Dalam perkembangannya, pariwisata Kabupaten Mamasa juga dihadapkan pada permintaan terhadap produk wisata yang bermutu sebagai akibat dari meningkatnya pengetahuan dan pengalaman wisatawan, serta persaingan dengan destinasi pariwisata lain. Kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada menjadi tantangan bagi semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Kabupaten Mamasa memiliki potensi daya tarik wisata baik itu alam, budaya, maupun kuliner yang sangat banyak dan tersebar, tetapi potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan sehingga pariwisata belum dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat di Kabupaten Mamasa. Perkembangan pariwisata

Kabupaten Mamasa saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Potensipotensi wisata yang ada belum dikembangkan dan dikelola dengan baik
karena terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, belum terbentuknya
sistem kelembagaan yang dapat mengelola kepariwisataan, kemampuan
sumber daya manusia pariwiasata yang masih terbatas dan pemasaran
pariwisata yang belum memanfaatkan ceruk pasar yang tersedia dengan
baik.

Dari uraian tersebut, sangat diharapkan peran dari pemerintah daerah menemukan solusi — solusi dalam mengembangkan segala potensi yang dimiliki sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Sektor pariwisata memerlukan suatu strategi pengembangan kepariwisataan yang terencana atau tersusun agar potensi yang dimiliki bisa dikembangkan secara optimal. Pemerintah daerah kabupaten Mamasa perlu menerapkan strategi yang efektif untuk pengembangan pariwisata. Strategi menjadi sangat penting bagi pengembangan sebuah organisasi/perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik melakukan penelitian "Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Mamasa".

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian yang dilakukan. strategi pengembangan pariwisata diidentifikasi dan dianalisis menggunakan dimensi strategi yaitu (1) tujuan, (2) kebijakan, dan (3) program menurut Mintzberg dkk (2003). untuk menentukan jenis strategi yang digunakan apakah strategi sebagai rencana, strategi sebagai taktik, strategi sebagai pola, strategi sebagai posisi, dan strategi sebagai perspektif, kemudian menganalisis faktormempengaruhi strategi pengembangan pariwisata di faktor yang Kabupaten Mamasa. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan output yang jelas bagi pengembangan pariwisata di Indonesia secara umum dan Kabupaten Mamasa pada khusunya. Berdasarkan hal tersebut, maka selanjutnya ditindaklanjuti dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana strategi yang diterapkan dalam pengembangan
 Pariwisata Kabupaten Mamasa ?
- Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Strategi pengembangan Pariwisata Kabupaten Mamasa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Strategi pengembangan
 Pariwisata Kabupaten Mamasa

Untuk menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor penghambat
 Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Mamasa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan referensi bagi mahasiswa yang berminat melakukan penelitian ilmiah dalam bidang yang sama dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan masukan kepada Pemerintah dalam mengembangkan pariwisata.

3 Manfaat Metodologis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan pembanding bagi mahasiswa / peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut yang berkaitan dengan Pengembangan pariwisata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pariwisata

Sebagai antisipasi perkembangan dunia pariwisata yang telah mengglobal sifatnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang terdiri atas tujuh belas bab dan tujuh puluh pasal yang mengandung ketentuan meliputi delapan hal, yaitu :

- Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- 4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

- Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalamsatu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas bpariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- 7. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 8. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Menurut Suwantoro (Kurniawan, 2015). Dorongan orang berwisata adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.

Menurut Yoeti dalam Anindita (2015), Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap. Suatu obyek wisata dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan harus memenuhi syarat-syarat untuk pengembangan daerahnya, suatu obyek pariwisata harus memenuhi tiga kriteria agar obyek tersebut diminati pengunjung Yoeti dalam Anindita (2015), yaitu:

Pertama, Something to see adalah obyek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang bisa di lihat atau di jadikan tontonan oleh pengunjung wisata. Dengan kata lain obyek tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang mampu untuk menyedot minat dari wisatawan untuk berkunjung di obyek tersebut. Kedua, Something to do adalah agar wisatawan yang melakukan pariwisata di sana bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan senang, bahagia, relax berupa fasilitas rekreasi baik itu arena bermain ataupun tempat makan, terutama makanan khas dari tempat tersebut sehingga mampu membuat wisatawan lebih betah untuk tinggal di sana. Ketiga, Something to buy adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada umumnya adalah ciri khas atau icon dari daerah tersebut, sehingga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh.

2.2 Konsep Kepariwisataan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1, Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Menurut Leiper dalam Ismayati (2009), terdapat tiga elemen utama yang menjadikan kegiatan kepariwisataan tersebut bisa terjadi yaitu :

 Wisatawan Adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi dan mengingatkan masa-masa di dalam kehidupan.

2. Elemen Geografi

Pergerakan wisatawan berlangsung pada tugas area geografi, seperti :

- a) Daerah Asal Wisatawan (DAW), daerah tempat asal wisatawan berada ketika ia melakukan aktivitas, seperti bekerja, belajar, kebutuhan dasar lain. Rutinitas itu sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang berwisata. Dari DAW, seseorang mencari informasi tentang obyek dan daya tarik wisata yang diminati, membuat pemesanan dan berangkat menuju daerah tujuan.
- b) Daerah Transit (DT), tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah itu. Namun, seluruh wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut sehingga peranan DT penting. Seringkali terjadi,

perjalanan wisata berakhir di daerah transit, bukan di daerah tujuan.

c) Daerah Wisata Tujuan (DWT), daerah ini sering dikatakan sebagai sharp end (ujung tombak) pariwisata. Di DWT ini dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Untuk menarik wisatawan, DWT meruapakan pemacu keseluruhan sistem pariwisata dan menciptakan permintaan untuk perjalanan dari DAW.

3. Industri Pariwisata

Elemen ketiga dalam kepariwisataan adalah industri pariwisata. Industri pariwisata merupakan unit-unit usaha atau bisnis di dalam kepariwisataan dan tersebar di ketiga area geografi tersebut yang menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana wisata. Sebagai contoh, biro perjalanan wisata bisa ditemukan di daerah asal wisatawan. penerbangan bisa ditemukan baik di daerah asal wisatawan maupun di daerah transit, dan akomodasi bisa ditemukan di daerah tujuan wisata.

Kepariwisataan menggambarkan beberapa bentuk perjalanan untuk memperoleh berbagai tujuan dan memuaskan berbagai macam keinginan. Pariwisata sebagai suatu gejala yang terwujud dalam beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut jumlah orang yang bepergian :

- Pariwisata Individu, yaitu hanya seorang atau satu keluarga yang bepergian.
- b. Pariwisata Rombongan, yaitu sekolompok orang yang biasanya terikat oleh hubungan-hubungan tertentu kemudian melakukan perjalanan bersama-sama.

2. Menurut maksud bepergian:

- a. Pariwisata Rekreasi atau Pariwisata Santai, yaitu pariwisata dengan maksud kepergian untuk memulihkan kemampuan fisik dan mental setiap peserta wisata dan memberikan kesempatan rileks bagi mereka dari kebosanan dan keletihan kerja selama di tempat rekreasi.
- b. Pariwisata Budaya, yaitu pariwisata yang bermaksud untuk memperkaya informasi dan pengetahuan tentang negara lain dan untuk memuaskan kebutuhan hiburan. Dalam hal ini termasuk pula kunjungan ke pameran-pameran dan fair, perayaan-perayaan adat, tempat-tempat cagar alam, cagar purbakala dan lain-lain.
- c. Pariwisata Pulih Sehat, yaitu yang memuaskan kebutuhan perawatan medis di daerah atau tempat lain dengan fasilitas penyembuhan. Misalnya : sumber air panas, tempat-tempat kubangan lumpur yang berkhasiat, perawatan dengan air mineral

yang berkhasiat dan lain-lain. Pariwisata ini memerlukan persyaratan tertentu antara lain kebersihan, ketenangan, dan taraf hidup yang pantas.

- d. Pariwisata Sport, yaitu pariwisata yang akan memuaskan hobi orang-orang, seperti memancing, berburu binatang liar, menyelam ke dasar laut, bermain ski, bertanding dan mendaki gunung.
- e. Pariwisata Temu Wicara, yaitu pariwisata konvensi yang mencakup pertemuan-pertemuan ilmiah, seprofesi dan bahkan politik. Pariwisata sejenis ini memerlukan tersedianya fasilitas pertemuan di negara tujuan dan faktor-faktor lain yang penting seperti letak yang strategis, tersedianya transportasi yang mudah, iklim yang cerah dan sebagainya.

3. Menurut alat transportasi:

- a. Pariwisata Darat
- b. Pariwisata Tirta
- c. Pariwisata Dirgantara

Menurut letak geografis :

a. Pariwisata Domestik Nasional, yang menunjukkan arus wisata yang dilakukan oleh warga dan penduduk asing yang bertugas di sana, yang terbatas dalam suatu negara tertentu.

- b. Pariwisata Regional, yaitu kepergian wisatawan terbatas pada
 beberapa negara yang membentuk suatu kawasan pariwisata.
- Pariwisata Internasional, yang meliputi gerak wisatawan dari suatu negara ke negara lain di dunia (Wahab, 1989).

Adapun menurut Pendit (Ilmu Pariwisata : sebuah pengntar perdana, 1999) antara lain :

1. Wisata Budaya

Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan berkunjung dan mempelajari keadaan rakyat dan kebiasaan adat istiadat, budaya dan seni mereka

2. Wisata Konverensi

Wisata Konvensi adalah wisata yang menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan tempat bersidang bagi peserta konverensi, atau pertemuan lainnya yang bersifat nasional maupun internasional.

Wisata Sosial

Wisata Sosial adalah perorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberikan kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan seperti misalnya kaum buruh, pemuda, pelajar atau mahasiswa, petani dan sebagainya.

4. Wisata Cagar Alam

Wisata Cagar Alam adalah wisata yang diselenggarakan agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ketempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang pelestariaannya dilindungi oleh undang-undang.

5. Wisata Bulan Madu

Wisata Bulan Madu adalah suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu, dengan fasilitas-fasilitas khusus, tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka.

2.3 Konsep Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada di dalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Pengembangan pariwisata diperlukan agar lebih banyak wisatawan datang pada suatu kawasan wisata, lebih lama tinggal, dan lebih banyak mengeluarkan uangnya di tempat wisata yang mereka

kunjungi sehingga dapat menambah devisa untuk negara bagi wisatawan asing, dan menambah pendapatan asli daerah untuk wisatawan lokal. Disamping itu juga bertujuan untuk memperkenalkan dan memelihara kebudayaan di kawasan pariwisata tersebut. Sehingga, keuntungan dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh penduduk sekitar khususnya.

Menurut Soekadijo (1996) tujuan pengembangan pariwisata diantaranya adalah untuk mendorong perkembangan beberapa sektor ekonomi, yaitu antara lain :

- Meningkatkan urbanisasi karena pertumbuhan, perkembangan serta perbaikan fasilitas pariwisata.
- Mengubah industri-industri baru yang berkaitan dengan jasa-jasa wisata. Misalnya, usaha transportasi, akomodasi (hotel, motel, pondok wisata, perkemahan, dan lain-lain) yang memerlukan perluasan beberapa industri kecil seperti kerajinan tangan.
- 3. Memperluas pasar barang-barang lokal.
- 4. Memberi dampak positif pada tenaga kerja, karena pariwisata dapat memperluas lapangan kerja baru (tugas baru di hotel atau tempat penginapan, usaha perjalanan, industri kerajinan tangan dan cendera mata, serta tempat-tempat penjualan lainnya).

Perkembangan kepariwisataan bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat, Marpaung (2002). Pariwisata dapat memberikan kehidupan yang standar kepada warga setempat melalui keuntungan ekonomi yang didapat dari tempat tujuan wisata. Dalam perkembangan infrastruktur dan fasilitas rekreasi, keduanya menguntungkan wisatawan dan warga setempat, sebaliknya kepariwisataan dikembangkan melalui penyediaan tempat tujuan wisata. Hal tersebut dilakukan melalui pemeliharaan kebudayaan, sejarah dan taraf perkembangan ekonomi dan suatu tempat tujuan wisata yang masuk dalam pendapatan untuk wisatawan akibatnya akan menjadikan pengalaman yang unik dari tempat wisata. Pada waktu yang sama, ada nilai-nilai yang membawa serta dalam perkembangan kepariwisataan. Sesuai dengan panduan, maka perkembangan pariwisata memperbesar keuntungan sambil memperkecil masalah-masalah yang ada.

Menurut Mariotto dalam Yoeti (1996) yang merupakan objek dan atraksi wisata adalah :

- Benda-benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta, yang istilah pariwisata disebut dengan natural amenities
- 2. Hasil cipta manusia (*man made supply*)
- 3. Tata cara hidup (the way of life)

Tersedianya objek wisata dan daya tarik wisata merupakan salah satu syarat yang harus tersedia dalam pengembangan pariwisata. Karena objek dan daya tarik wisata merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk datang berkunjung.

Menurut Suwontoro (2001) pada umumnya objek wisata dipengaruhi oleh :

- Adanya sumber / obyek yang dapat menimbulkan rasa senang, nyaman, dan bersih.
- 2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjungi.
- 3. Adanya arti khusus yang bersifat langka.
- 4. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir.
- Obyek wisata alam mempunyai daya tarik yang tinggi karena keindahannya, seperti keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang Kepariwisatan No. 10 tahun 2009 dijelaskan bahwa setiap kegiatan Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan atas asas: 1) manfaat, 2) kekeluargaan, 3) adil dan merata, 4) keseimbangan, 5) kermandirian, 6) kelestarian, 7) partisipatif, 8) berkelanjutan, 9) demokratis, 10) kesetaraan dan 11) kesatuan.

Pengembangan potensi daya tarik atau atraksi wisata meliputi daya tarik alami yang bersifat melekat (*inherent*) dengan keberadaan obyek wisata alam tersebut. Selain daya tarik alami, suatu obyek wisata memiliki daya tarik buatan manusia (*man made attraction*).

Pengembangan sarana dan prasarana juga sangat penting karena dengan berkembangnya sarana dan prasarana maka kenyamanan para wisatawan dapat terjamin. Menurut Yoeti (1996) yang termasuk kelompok prasarana kepariwisataan adalah:

- 1. Prasarana perhubungan seperti jaringan jalan raya dan kereta api.
- 2. Instalansi pembangkit tenaga listrik.
- 3. Instalansi penyulingan bahan bakar minyak.
- 4. Sistem irigasi untuk kepentingan pertanian, peternakan, perkebunan.
- 5. Sistem perbankkan dan moneter.
- 6. Sistem telekomunikasi.
- 7. Pelayanan kesehatan, keamanan, dan pendidikan.

Sementara itu unsur-unsur pengembangan pariwisata menurut Santoso dalam Kurniawan (2015) meliputi:

1. Atraksi

Atraksi atau daya tarik dapat timbul dari keadaan alam (keindahan panorama, flora dan fauna, sifat khas perairan laut, danau), obyek buatan manusia (museum, katedral, masjid kuno, makam kuno dan

sebagainya), ataupun unsur-unsur dan peristiwa budaya (kesenian, adat istiadat, makanan dan sebagainya).

2. Transportasi

Perkembangan transportasi berpengaruh atas arus wisatawan dan juga perkembangan akomodasi. Di samping itu perkembangan teknologi transportasi juga berpengaruh atas fleksibilitas arah perjalanan, Jika angkutan dengan kereta api bersifat linier, tidak banyak cabang atau kelokannya, dengan kendaraan mobil arah perjalanan dapat menjadi lebih bervariasi. Demikian pula dengan angkutan pesawat terbang yang dapat melintasi berbagai rintangan alam (waktu yang lebih singkat).

Akomodasi

Tempat menginap dapat dibedakan antara yang dibangun untuk keperluan umum (hotel, motel, tempat pondokan, tempat berkemah waktu liburan) dan yang diadakan khusus peorangan untuk menampung menginap keluarga, kenalan atau anggota perkumpulan tertentu atau terbatas.

4. Fasilitas Pelayanan

Penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan bervariasi sejalan dengan perkembangan arus wisatawan. Perkembangan pertokoan dan jasa pelayanan pada tempat wisata

dimulai dengan adanya pelayanan jasa kebutuhan sehari-hari (penjual makanan, warung minum atau jajanan), kemudian jasa-jasa perdagangan (pramuniaga, tukang-tukang atau jasa pelayanan lain), selanjutnya jasa untuk kenyamanan dan kesenangan (toko pakaian, toko perabot rumah tangga, dll), lalu jasa yang menyangkut keamanan dan keselamatan (dokter, apotek, polisi dan pemadam kebakaran) dan pada akhirnya perkembangan lebih lanjut menyangkut juga jasa penjualan barang mewah.

5. Infrastruktur

Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayanan dan fasilitas pendukung. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga memberi manfaat (dapat digunakan) bagi penduduk setempat disamping mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini menyangkut tidak saja pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, jalan kereta api, dll), tetapi juga penyediaan saluran air minum, penerangan listrik, dan juga saluran pembuangan limbah. .

Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri secara ideal harus berlandaskan pada empat prinsip dasar, sebagaimana dikemukakan Sobari dalam Anindita, (2015), yaitu:

 Kelangsungan ekologi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus menjamin terciptanya pemeliharaan dan proteksi terhadap sumberdaya alam yang menjadi daya tarik pariwisata, seperti lingkungan laut, hutan, pantai, danau, dan sungai.

- Kelangsungan kehidupan sosial dan budaya, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus mampu meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan tata kehidupan melalui sistem nilai yang dianut masyarakat setempat sebagai identitas masyarakat tersebut.
- Kelangsungan ekonomi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus dapat menciptakan kesempatan kerja bagi semua pihak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi melalui suatu sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif.
- 4. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata.

Dengan demikian, pengembangan pariwisata perlu didukung dengan perencanaan yang matang dan harus mencerminkan tiga dimensi kepentingan, yaitu industri pariwisata, daya dukung lingkungan (sumber daya alam), dan masyarakat setempat dengan sasaran untuk peningkatan kualitas hidup. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pariwisata pengembangan pariwisata mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Perencanaan pengembangan pariwisata harus menyeluruh sehingga seluruh bagi pengembangan pariwisata di perhitungkan dengan memperhatikan pula perhitungan untung rugi apabila dibandingkan dengan pembangunan sektor lain.
- Pengembangan pariwisata harus diintegrasikan ke dalam pola dan program pembangunan semasa ekonomi, fisik dan sosial sesuatu negara.
- Pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa sehingga membawakan kesejahteraan ekonomi yang tersebar luas dalam masyarakat.
- 5. Pengembangan pariwisata harus sadar lingkungan sehingga pengembangannya mencerminkan ciri-ciri khas budaya dan lingkungan alam sesuatu negara, bukannya justru merusak lingkungan alam dan budaya yang khas itu.
- 6. Pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa sehingga pertentangan sosial dapat dicegah seminimal mungkin dan dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial yang positif.
- 7. Penentuan tata cara pelaksanaannya harus disusun sejelasjelasnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang masak sesuai kemampuan.

8. Pencatatan (*monitoring*) secara terus-menrus mengenai pengaruh pariwisata terhadap suatu masyarakat dan lingkungan sehingga merupakan bahan yang baik untuk meluruskan kembali akibat perkembangan pariwisata yang merugikan sehingga merupakan sarana pengendalian pengembangan yang terarah.

Pemerintah telah merumuskan tujuan dan arahan pembangunan pariwisata ke dalam visi dan misi pembangunan kepariwisataan nasional, yang terdapat dalam RIPPARNAS pasal 2 PP no. 50 tahun 2011. Dalam tinjauan pengembangan pariwisata nasional, Visi dan misi pembangunan kepariwisataan nasional adalah

"Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat".

(sumber Riparda kabupaten Mamasa)

Misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan :

- Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung Sulawesib untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;

- Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung Sulawesib terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- 4. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.

Sebagaimana dijelaskan dalam RIPPARNAS sasaran pembangunan kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut,:

- 1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
- 2. Jumlah pergerakan wisatawan nusantara;
- 3. Jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara;
- 4. Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan
- 5. Produk domestik bruto di bidang Kepariwisataan.

2.4 Tinjauan Pariwisata dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pada prinsipnya memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri sesuai aspirasi masyarakat serta kondisi objektif daerahnya. Otonomi daerah akan dapat meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada masyarakat,

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong proses demokratisasi di daerah ke arah yang lebih berkembang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, melakukan otonomi daerah perlu adanya asas yang harus dijalankan yaitu sebagai berikut :

- Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.
- Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah provinsi).
- Tugas pembantuan. Dalam hal ini pemerintah daerah ikut serta mengurus sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. (Syafiie, Ilmu Pemerintahan. 2013).

Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan Kepariwisataan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah, sebagai berikut:

 Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;

- Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Selanjutnya, juga diatur pada pasal 30 Undang-Undang Kepariwisataan mengenai wewenang Pemerintah kabupaten/kota dalam hal kepariwisataan, yaitu:

- a) Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b) Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c) Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d) Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e) Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f) Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;

- g) Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h) Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i) Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j) Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
- k) Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

2.5 Konsep Strategi

Secara etimologi, strategi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, strategos yang diterjemahkan sebagai "komandan militer" pada zaman demokrasi Athena. Istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Secara terminologi, strategi adalah pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitanya dengan tujuan jangka panjang, serta prioritas alokasi sumber daya Amstrong dalam Chandler (2003:37), sedangkan menurut Quinn (1999:10) strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuantujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Kenichi Ohmae (Kurniawan dan Hamdani, 2000) seorang pakar pemasaran sekaligus konsultan manajemen tersohor dan penulis buku *The End of Nation State* mengatakan :

"Strategi adalah "keunggulan bersaing guna mengubah kekuatan perusahaan menjadi sebanding atau melebihi kekuatan pesaing melalui cara yang paling efisien".

Adapun Benjamin Tregoe dan John William Zimmerman (Kurniawan dan Hamdani, 2000) mendefinisikan strategi sebagai :

"kerangka yang membimbing dan mengendalikan pilihan-pilihan yang menetapkan arah serta karakteristik suatu organisasi".

Gerry Jhonson dan Kevan Scholes (Jemsly Hutabarat dan Martani

Huseini 2006:18) menyatakan bahwa :

"strategi sebagai arah dan cakupan jangka panjang organisasi untuk mendapatkan keuntungan melalui konfigurasi sumber daya lingkungan yang berubah untuk mencapai kebutuhan pasar dan memenuhi harapan berbagai pihak".

Menurut Glueck dan Jauch (Sedarmayanti, 2014):

"strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan, dirancang untuk memastikan tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi".

Dalam merumuskan suatu strategi, manajemen puncak harus memperhatikan berbagai faktor yang sifatnya kritikal, yaitu :

Pertama: Strategi berarti menentukan misi pokok suatu organisasi karena manajemen puncak menyatakan secara garis besar apa yang menjadi pembenaran keberadaan organisasi, filosofi yang bagaimana yang akan digunakan untuk menjamin keberadaan organisasi tersebut dan sasaran apa yang ingin dicapai. Yang jelas menonjol dalam dalam faktor pertama ini ialah bahwa strategi merupakan keputusan dasar yang dinyatakan secara garis besar.

Kedua: Dalam merumuskan dan menetapkan strategi, manajemen puncak mengembangkan profil tertentu bagi organisasi. Profil dimaksud harus menggambarkan kemampuan yang dimiliki dan kondisi internal yang dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan.

Ketiga: Pengenalan yang tentang lingkungan dengan mana organisasi akan berinteraksi, terutama situasi yang membawa suasana persaingan yang mau tidak mau harus dihadapi oleh organisasi apaila organisasi yang bersangkutan ingin tidak hanya mampu melaksanakan eksistensinya, akan tetapi juga meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerjanya.

Keempat: Suatu strategi harus merupakan analisis yang tepat tentang kekuatan yang dimiliki oleh organisasi, kelemahan yang mungkin melekat pada dirinya, berbagai peluang yang mungkin timbul dan harus dimanfaatkan serta ancaman yang diperkirakan akan dihadapi. Dengan analisis yang tepat berbagai alternatif yang dapat ditempuh akan terlihat.

Kelima: Mengidentifikasikan beberapa pilihan yang wajar ditelaah lebih lanjut dari berbagai alternatif yang tersedia dikaitkan dengan keseluruhan upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Keenam: Menjatuhkan pilihan pada satu alternatif yang dipandang paling tepat dikaitkan sasaran jangka panjang yang dianggap mempunyai nilai yang paling stratejik dan diperhitungkan dapat dicapai karena didukung oleh kemampuan dan kondisi internal organisasi.

Ketujuh: suatu sasaran jangka panjang pada umumnya mempunyai paling sedikit empat ciri yang paling menonjol, yaitu:

- a. sifatnya yang idealistik,
- b. jangkauan waktunya jauh ke masa depan,
- c. hanya bisa dinyatakan secara kualitatif, dan
- d. masih abstrak.

Dengan cirri-ciri seperti itu, suatu strategi perlu memberikan arah tentang rincian yang perlu dilakukan. Artinya, perlu ditetapkan sasaran antara dengan ciri-ciri:

- a. jangkauan waktu ke depan spesifik,
- b. praktis dalam arti diperkirakan mungkin dicapai,
- c. dinyatakan secara kuantitatif, dan
- d. bersifat konkret.

Kedelapan: Memperhatikan pentingnya operasionalisasi keputusan dasar yang dibuat dengan memperhitungkan kemampuan organisasi di bidang anggaran, sarana, prasarana, dan waktu.

Kesembilan: Mempersiapkan tenaga kerja yang memenuhi berbagai persyaratan bukan hanya dalam arti kualifikasi teknis, akan tetapi juga keperilakuan serta mempersiapkan system manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada pengakuan dan penghargaan harkat dan martabat manusia dalam organisasi.

Kesepuluh: teknologi yang akan dimanfaatkan yang karena peningkatankecanggihannya memerlukan seleksi yang tepat.

Kesebelas: Bentuk, tipe, dan struktur organisasi yang akan digunakan pun harus turut diperhitungkan, misalnya apakah akan mengikuti pola tradisional dalam arti menggunakan struktur yang hierarkiral dan piramidal, ataukah akan menggunakan struktur yang lebih datar dan mungkin berbentuk matriks.

Keduabelas: Menciptakan suatu sistem pengawasan sedemikian rupa sehingga daya inovasi kreativitas dan diskresi para pelaksana kegiatan operasional tidak "dipadamkan".

Ketigabelas: Sistem penilaian tentang keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan strategi yang dilakukan berdasarkan serangkaian kriteria yang rasional dan objektif.

Keempatbelas: Menciptakan suatu sistem umpan balik sebagai instrument yang ampuh bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan strategi yang telah ditentukan itu untuk mengetahui apakah sasaran terlampaui, hanya sekedar tercapai atau bahkan mungkin tidak tercapai. Kesemuanya ini diperlukan sebagai bahan dan dasar untuk mengambil keputusan di masa depan.

Dari pembahasan di atas kiranya jelas bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan strategi bagi manajemen organisasi pada umumnya ialah rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemilkian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan (Siagian 2003:16).

Sementara itu, menurut Henry Mintzberg, Joseph Lampel, James Brian Quinn, dan Sumantra Ghoshal (2003) dalam buku *The Strategy Process*, menyajikan lima definisi strategi yaitu :

1. Strategi Sebagai Rencana

Strategi adalah rencana, semacam sadar dimaksudkan yang meliputi "tindakan, pedoman" (atau pedoman yang ditetapkan) untuk menangani situasi. Dengan definisi ini, strategi memiliki dua karakteristik penting: dibuat sebelum tindakan diterapkan, dan dikembangkan secara

sadar dan sengaja. Sebagai rencana, strategi berkaitan dengan bagaimana pemimpin mencoba untuk menetapkan arah untuk organisasi, untuk mengatur mereka pada tindakan yang telah ditentukan. Dalam mempelajari strategi sebagai rencana, kita harus masuk ke dalam pikiran strategi, untuk mencari tahu apa yang benar-benar dimaksudkan.

2. Strategi Sebagai Taktik

Sebagai taktik, strategi membawa kita ke dalam wilayah persaingan langsung, dimana ancaman dan feints dan berbagai manuver lain bekerja untuk mendapatkan keuntungan. Tempat ini proses pembentukan strategi dalam pengaturan yang paling dinamis, dengan gerakan memprovokasi dan seterusnya. Namun Ironisnya, strategi itu sendiri adalah sebuah konsep yang berakar tidak dalam perubahan tetapi dalam stabilitas dalam mengatur rencana dan pola didirikan.

3. Strategi Sebagai Pola

Strategi adalah pola, khususnya pola dalam aliran tindakan. Menurut definisi ini, strategi adalah konsistensi dalam perilaku .Sebagai pola, bertitik berat pada tindakan. Strategi sebagai pola juga memperkenalkan gagasan tentang konvergensi, pencapaian konsistensi dalam perilaku organisasi. Menyadari strategi dimaksudkan, mendorong kita untuk mempertimbangkan gagasan bahwa strategi dapat muncul serta sengaja dikenakan.

4. Strategi Sebagai Posisi

Strategi sebagai posisi, yaitu organisasi disebut sebagai "lingkungan". Dengan definisi ini, strategi menjadi mediasi antara organisasi dan lingkungan dalam konteks internal dan eksternal. Definisi strategi sebagai posisi dapat dicocokkan dengan pengertian orang-orang sebelumnya, yaitu:

- a. Posisi dapat dipilih dari dan diinginkan melalui sebuah rencana atau cara,
- b. Posisi dapat dijangkau, bahkan ditemukan melalui pola tingkah laku.

Sebagai posisi, strategi ini mendorong kita untuk melihat organisasi dalam lingkungan kompetitif mereka, bagaimana mereka menemukan posisi mereka dan melindungi mereka untuk memenuhi persaingan, menghindarinya, atau menumbangkannya. Hal ini memungkinkan kita untuk berpikir organisasi secara ekologis, sebagai organisme dalam ceruk yang berjuang untuk bertahan hidup di dunia permusuhan dan ketidak pastian serta simbiosis.

5. Strategi sebagai Perspektif

Strategi sebagai perspektif bukan hanya terdiri dari posisi pilihan, tetapi cara yang tertanam memahami dunia. Definisi ini menunjukkan bahwa semua konsep strategi memiliki satu implikasi penting, yaitu bahwa semua strategi adalah abstraksi yang hanya ada di pikiran pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk diingat bahwa tidak ada yang

pernah melihat atau menyentuh strategi, setiap strategi adalah sebuah penemuan, khayalan dari imajinasi seseorang, apakah dirumuskan sebagai niat untuk mengatur perilaku itu berlangsung atau disimpulkan sebagai pola untuk menggambarkan perilaku yang telah terjadi. Strategi sebagai posisi dan perspektif sangat cocok dengan strategi sebagai rencana dan pola. Tapi, hubungan antara definisi yang berbeda ini jelas terlihat, konsep strategi yang ada bahwa pola dapat muncul dan diakui menimbulkan rencana resmi dalam perspektif keseluruhan.

Sementara berbagai hubungan yang ada antara definisi yang berbeda, satu hubungan, atau satu definisi diutamakan dibanding yang lain. Dalam beberapa hal, definisi ini bersaing (dalam artian bahwa mereka dapat menggantikan satu sama lain), tetapi mungkin cara yang lebih penting, mereka saling melengkapi. Masing-masing definisi menambahkan elemen penting untuk pemahaman kita tentang strategi, mendorong kita untuk mengatasi pertanyaan mendasar mengenai organisasi secara umum.

Adapun jenis-jenis strategi di dalam buku Konsep Manajemen Strategis, David (Guswan 2015:16) menjelaskan bahwa ada beberapa jenis strategi alternative, yaitu :

1. Strategi Integrasi

Strategi integrasi adalah jenis strategi yang memungkinkan sebuah perusahaan memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan / atau pesaing. Jenis-jenis integrasi adalah sebagai berikut :

a. Integrasi ke depan

Integrasi ke depan adalah jenis integrasi yang berkaitan dengan usaha untuk memperoleh kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas distributor atau peritel.

b. Integrasi ke belakang

Integrasi ke belakang adalah jenis integrasi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pemasok perusahaan.

c. Integrasi horizontal

Integrasi horizontal adalah jenis integrasi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pesaing.

2. Strategi Intensif

Strategi intensif adalah jenis strategi yang mengharuskan adanya upayaupaya intensif jika posisi kompetitif sebuah perusahaan dengan produk yang ada saat ini ingin membaik.

a. Penetrasi pasar

Penetrasi pasar adalah jenis strategi yang mengusahakan peningkatan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang ada di pasar saat ini melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih besar.

b. Pengembangan pasar

Pengembangan pasar adalah jenis strategi yang memperkenalkan produk atau jasa saat ini ke wilayah geografis baru.

c. Pengembangan produk

Pengembangan produk adalah jenis strategi yang mengupayakanpeningkatan penjualan melalui perbaikan produk atau jasa saat ini atau pengembangan produk atau jasa baru.

3. Strategi Diversifikasi

Strategi diversifikasi adalah suatu jenis strategi dimana perusahaan menambah produk atau jasa baru untuk membantu meningkatkan penjualan perusahaan.

a. Diversifikasi Terkait

Diversifikasi terkait adalah jenis strategi dimana perusahaan menambah produk atau jasa yang baru namun masih berkaitan dengan produk atau jasa perusahaan yang lama.

b. Diversifikasi tak terkait

Diversifikasi tak terkait adalah jenis strategi dimana perusahaan menambah produk atau jasa yang baru namun tidak berkaitan sama sekali dengan garis bisnis perusahaan sebelumnya.

4. Strategi Defensif

Strategi defensif adalah jenis strategi dimana kondisi perusahaan sedang mengalami penurunan sehingga harus melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan asset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun.

a. Penciutan

Penciutan adalah strategi dimana dilakukan pengelompokan ulang (regrouping) melalui pengurangan biaya dan asset untuk membalik penjualan dan laba yang menurun.

b. Divestasi

Divestasi adalah strategi dimana dilakukan penjualan suatu divisi atau bagian dari suatu organisasi.

c. Likuidasi

Likuidasi adalah strategi dimana dilakukan penjualan seluruh asset perusahaan, secara terpisah-pisah, untuk kekayaan berwujudnya.

Adapun Jenis-jenis strategi yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins dan Mary Coulter dalam buku *Manajemen* yang

mengklasifikasikan jenis-jenis strategi berdasarkan tingkatan organisasinya, yaitu :

1. Strategi Tingkat Korporasi

Strategi tingkat korporasi (*corporate-level strategis*) berusaha menentukan apakah yang seharusnya dimasuki atau ingin dimasuki perusahaan. Strategi tingkatan korporasi menentukan arah yang akan dituju organisasi itu dan peran yang akan dimainkan oleh tiap unit bisnis organisasi itu dalam mengejar arah itu. Ada tiga strategi korporasi yang utama, yaitu:

- a. Strategi Pertumbuhan adalah strategi tingkatan korporasi yang berusaha meningkatkan tingkat operasi organisasi tersebut dengan meluaskan jumlah produk yang ditawarkan atau pasar yang dilayani.
- b. Stabilitas strategi adalah strategi tingkat korporasi yang dicirikan oleh tiadanya perubahan yang berarti. Contoh strategi itu mencakup secara terus menerus melayani klien yang sama dengan menawarkan produk atau jasa yang sama, mempertahankan pangsa pasar, dan mempertahankan tingkat hasil atas investasi (return on investment) organisasi tersebut.
- c. Strategi Pembaharuan adalah membuat strategi yang mengatasi kelemahan organisasional yang menyebabkan penurunan kinerja.

Ada dua jenis utama dari strategi pembaharuan : Strategi pengurangan adalah suatu strategi pembaharuan jangka pendek yang digunakan dalam situasi ketika masalah kinerja tak begitu serius. Strategi perubahan haluan adalah strategi pembaharuan untuk saat di mana masalah kinerja organisasi menjadi lebih kritis.

2. Strategi Tingkat Perusahaan

Strategi tingkat perusahaan berusaha menentukan cara organisasi bersaing dalam tiap bisnisnya atau tiap perusahaannya. Bagi organisasi kecil yang menekuni hanya satu lini bisnis atau organisasi besar yang tidak melakukan diversifikasi ke berbagai produk atau pasar, strategi tingkatan perusahaan itu lazimnya tumpang tindih dengan strategi korporasi organisasi tersebut. Bagi organisasi-organisasi yang memiliki bisnis beragam, bagaimanapun juga, tiap-tiap divisi akan mempunyai strateginya sendiri yang mendefinisikan produk atau jasa yang akan ditawarkannya, pelanggan yang ingin diraihnya atau semacamnya.

3. Strategi Tingkat Fungsional

Strategi tingkat fungsional mendukung strategi tingkat bisnis. Bagi organisasi yang memiliki departemen fungsional tradisional, seperti pabrikasi, pemasaran, sumber daya manusia, riset dan pengembangan, dan keuangan, strategi-strategi itu harus mendukung strategi tingkat perusahaan.

2.6 Proses Manajemen Strategis

Manajemen strategi merupakan suatu proses yang terikat atau terdiri dari rangkaian tahap-tahapan sebagai berikut:

1. Perumusan strategi

Tahapan manajemen strategik diawali dengan perumusan strategi. Perumusan strategi adalah proses strategi untuk mewujudkan visi organisasi. Proses pengambilan keputusan untuk menetapkan strategi seolah merupakan konsekuensi mulai dari penetapan visi-misitujuan jangka panjang-swot-strategi. Kenyataannya perumusan strategi dapat dimulai dari mana saja, bisa dimulai dari SW, OT atau bahkan dari strategi itu sendiri. Namun yang terpenting, seperti yang ditunjukkan pada gambar (2.1), strategi dan kesesuaian; pilihan strategi akhirnya harus saling sesuai dengan Peluang-Ancaman yang ada, Kekuatan-Kelemahan yang dimiliki dan Tujuan (misi-visi-goal) yang ingin dicapai.

Tujuan (Misi-Visi-Goal)

Kesesuaian (Strategi)

Kondisi Eksternal

(OT)

Gambar 2.1 Strategi dan Kesesuaian

Sumber: Tripomo, Tedjo (2005:28)

Kondisi

Internal (SW) Strategi akan dirumuskan melalui tahapan utama sebagai berikut:

- a. Analisis Arah, yaitu untuk menentukan visi-misi-tujuan jangka panjang yang ingin dicapai organisasi.
- Analisis Situasi, yaitu tahapan untuk membaca situasi dan menentukan Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman yang akan menjadi dasar perumusan straetegi.
- c. Penetapan Strategi, yaitu tahapan untuk identifikasi alternatif dan memilih strategi yang akan dijalankan organisasi.

Untuk mencapai daya saing strategis dan memperoleh hasil sesuai dalam rencana organisasi, perusahaan harus menganalisa lingkungan eksternal, mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam lingkungan tersebut, menentukan mana di antara sumber daya internal dan kemampuan yang dimiliki yang merupakan kompetensi intinya, dan memilih strategi yang cocok untuk diterapkan (*strategic formulation*). Suatu strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing.

2. Analisis Lingkungan

Analisis lingkungan adalah proses dalam manajemen strategi yang bertujuan untuk memantau lingkungan perusahaan. Secara garis besar analisis lingkungan disini mencakup analisis mengenai lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal akan mencakup lingkungan umum dan lingkungan industri, sedangkan

analisis internal akan mencakup analisis mengenai aktivitas perusahaan atau bisa juga analisis mengenai sumber daya, kapabilitas serta kompetensi inti yang dimiliki. Hasil dari analisis lingkungan ini setidaknya akan memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan yang biasanya disederhanakan dengan metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang dimilikinya. Analisis eksternal akan memberikan gambaran tentang peluang dan ancaman (OT) sedangkan analisis lingkungan internal akan memberikan tentang keunggulan dan kelemahan (SW) dari perusahaan.

Secara khusus, peran atau fungsi analisis lingkungan bagi tiap perusahaan tentu saja berbeda-beda (Musa Hubeis dan Mukhamad Najib, 2008) dalam buku Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi. Namun, secara umum, jika mengacu pada pendapat Cerro dan Peter, ada tiga peran utama yang biasa ditemui sehari-hari, yaitu *Policy Oriented Role, Integrated Strategic Planning Role*, dan *Function Oriented Role*. Untuk jelasnya, berikut akan diuraikan secara rinci.

a. Policy-Oriented Role

Peran yang dimaksud disini adalah peran analisis yang berorientasi pada kebijakan manajemen tingkat atas dan bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan memberikan informasi bagi manajemen tingkat atas tentang kecenderungan utama yang muncul dalam lingkungan. Peran ini menekankan pada deteksi

awal dan reaksi manajemen tingkat atas yang sesuai dengan masalah strategik yang luas seperti sikap, norma, dan hukum yang memengaruhi perusahaan secara keselurahan. Peran ini juga memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan biasanya dijalankan secara tidak tersturktur. Bagian yang memiliki peran ini biasanya memiliki akses langsung ke manajemen ke manajemen tingkat atas dan berfokus pada organisasi secara keseluruhan.

b. Integrated Startegic Planning Role

Peran ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan membuat manajemen tingkat atas dan manajer divisi menyadari segala isu yang terjadi di lingkungan perusahaan yang memiliki implikasi langsung pada proses perencanaan. Fungsi ini dijalankan oleh bagian perencanaan baik di tingkat korporat maupun tingkat divisi dengan melakukan laporan rutin. Laporan tersebut biasanya berupa proyeksi keadaan lingkungan yang akan dijadikan asumsi dasar dalam proses perencanaan dan laporan informasi lainnya.

c. Function-Oriented Role

Peran ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan menyediakan informasi lingkungan yang memberi perhatian pada efektivitas kinerja fungsi organisasi tertentu. Peran ini berorientasi pada masalah tertentu yang menjadi target utama dalam perusahaan.

Ada beberapa macam teknik yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan analisis lingkungan, antara lain:

a. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) dan Evaluasi Faktor
 Internal (EFI)

Salah satu tugas utama yang harus dipecahkan dalam analisis mengidentifikasi lingkungan adalah kekuatan. kelemahan. kesempatan, dan ancaman yang mungkin memengaruhi pertumbuhan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Untuk lingkungan eksternal dan lingkungan jauh, matriks yang digunakan adalah EFE yang memuat faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang memberi kesempatan organisasi untuk maju. Sementara, matriks EFI yang didaftar adalah faktor-faktor lingkungan internal (Strengths dan Weakness). Agar kesan subjektif matriks EFE dan EFI dapat dikurangi, sebaiknya hasil-hasil tersebut dibandingkan dengan pesaing-pesaingan dan dimasukkan ke sebuah matriks tersendiri yang disebut Competitive Profile Matrix (CPM Matrix). Faktor-faktor yang diperhitungkan dalam matriks CPM biasanya jauh lebih luas dan sifatnya lebih umum bila dibandingkan dengan faktor-faktor yang ada dalam matriks EFE ataupun EFI.

b. Envorinmental Scanning

Teknik analisis ini merupakan proses pengumpulan informasi tentang berbagai peristiwa dan hubungannya dengan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Tiga bentuk utamanya yaitu:

Irregular scanning systems

Sistem ini digunakan ketika terjadi krisis lingkungan-fokus utamanya ditujukan pada hal-hal yang sudah terjadi. Penekanan sistem ini adalah untuk mengatasi krisis jangka pendek yang kurang memerhatikan masa depan.

Reguler scanning system

Sistem ini menjalankan analisis regular atas lingkungan yang nyata. Biasanya analisis ini terjadwal per semester dalam suatu *review. Scanning* semacam ini bersifat *decision-oriented*-manajemen mengulas hasil analisis selama proses pengambilan keputusan.

Continuous scanning system

Sistem ini secara konstan memonitor berbagai komponen lingkungan. Sifatnya *on-going activity* yang dijalankan tidak untuk sementara, melainkan terus-menerus oleh bagian atau bidang tertentu.

c. Environmental Forecasting

Teknik ini merupakan proses penentuan kondisi-kondisi apa yang mungkin muncul dalam lingkungan organisasi di masa mendatang. Berdasarkan informasi yang didapat, manajemen perusahaan

kemudian memproyeksikan keadaan masa depan komponen kunci lingkungan perusahaan pada seluruh tingkatan, yang meliputi lingkungan umum, industry, dan internal.

d. Metode PRECOM

Metode PRECOM sebagai pendekatan refleksi pemasaran bertumpu pada faktor-faktor lingkungan seperti mikro ekonomi, produksi, pemasaran, makro ekonomi, sosiodemografi, infrastruktur, dan teknik industry. Dalam penggunaannya, metode PRECOM didukung oleh perangkat analisis sistemik (masukan, proses, luaran) seperti analisis fungsional, analisis proses, dan analisis strategi.

3. Menentukan dan Menetapkan Arah Organisasi

Setelah melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal diharapkan kita sudah dapat memiliki gambaran mengenai posisi perusahaan dalam persaingan, dimana diharapkan kita sudah mampu untuk mendefinisikan keunggulan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan (SWOT analysis). Berdasarkan informasi ini selanjutnya ditentukan dan ditetapkan ke arah mana perusahaan hendak di arahkan. Biasanya ada dua indikator utama yang digunakan untuk menentukan arah organisasi. Pertama adalah misinya, misi ini berfungsi sebagai reison d'etre, menjelaskan mengapa organisasi tersebut ada. Selain itu misi ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang baik tentang pelanggan, pasar, filosofi,

citra, yang diinginkan dari masyarakat serta teknologi yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan. Hal yang tak kalah pentingnya dalam menentukan arah perusahaan ini adalah menetapkan tujan yang diinginkan perusahaan, dimana tujuan ini biasanya merefleksikan target yang akan dicapai oleh organisasi. Sebelum sebuah misi dan tujuan ditentukan, perusahaan sebaiknya memiliki visi atau kita sebut sebagai *strategic architecture*. *Strategic architecture*, misi dan tujuan ini agar mantap dan optimal harus didorong oleh suatu *strategic intent*.

4. Penetapan Visi dan Misi Objektif

Menetapkan visi dimaksudkan untuk memberikan arah tentang akan menjadi apa atau seperti apa organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang, atau secara secara ringkas suatu pandangan ke depan tentang perusahaan atau organisasi.

Crown Dirgantoro (2001;24) mendefenisikan visi sebagai:

"Visi adalah pandangan yang jauh tentang perusahaan atau organisasi, tujuan-tujuan perusahan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut" 1

Misi akan secara spesifik lagi dibandingkan dengan visi. Misi secara spesifik menekankan tentang produk yang diproduksi, pasar yang dilayani, dan hal-hal lain secara spesifik berhubungan langsung dengan bisnis. Secara singkat visi memberi pejelasan tentang apa bisnis perusahaan. Objektif lebih kepada penetapan target secara spesifik

dan sedapat mungkin terukur yang ingin dicapai perusahaan untuk jangka waktu tertentu atau target yang ingin dicapai.

5. Formulasi Strategi

Formulasi strategi adalah menentukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. aktivitas tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu: analisis strategi, perencanaan strategi, pemilihan strategi.

Ciri utama teknik analisis yang didasarkan pada teori ilmiah (Musa Hubeis dan Mukhamad Najib, 2008:91) dalam buku Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi adalah kemampuannya untuk mendapatkan pemecahan atas masalah yang kompleks setelah memasukkan data yang diketahui dan memilih alternative yang telah diseleksi terlebih dahulu. Semua yang berpartisipasi dalam aktivitas analisis dan pilihan strategi harus memiliki audit internal dan eksternal. Setelahnya, perencanaan strategi diintegrasikan dalam kerangka kerja pengambilan keputusan yang terdiri atas tiga tahap. Di antaranya:

- a. Tahap input: untuk meringkas informasi dasar yang dibutuhkan dalam merumuskan strategi. Pada tahap ini kita dapat menggunakan matriks Evaluasi Faktor Internal (EFI), Evaluasi Faktor Eksternal (EFE), dan matriks Profil Persaingan (Competitive Profile Matrix atau CPM).
- b. Tahap pencocokan: berfokus pada penciptaan alternative strategi yang layak dengan mencocokan faktor eksternal dan internal.

Tahap ini mencakup penggunaan matriks Kekuatan - Kelemahan - Peluang - Ancaman (*Strength - Weakness - Opportunities - Threats* atau SWOT), matriks Evaluasi Tindakan dan Posisi Strategi (*Strategic Position and Action Evaluation* atau SPACE), matriks Boston Consulting Group (BCG), dan *Grand Strategy Matrix*.

c. Tahap keputusan: melibatkan strategi tunggal, yaitu matriks

Perencanaan Strategik Kuantitatif (*Quantitative Strategic Planning Matrix* atau QSPM)

6. Perencanaan Tindakan

Langkah pertama untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan adalah membuat perencanaan strategik. Inti dari apa yang ingin dilakukan pada tahapan ini adalah bagaimana membuat rencana pencapaian (sasaran) dan rencana kegiatan (program dan anggaran) yang benar-benar sesuai dengan arahan (misi-visi-goal) dan strategi yang telah ditetapkan organisasi. Program berisi tahapanmerupakan urutan kegiatan yang perlu tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategik (the step-by step sequence of actions). Sedangkan dalam rumusan anggaran berisi rencana kegiatan/program (biasanya tahunan) yang disertai taksiran sumber daya diperlukan untuk menjalankan kegiatan yang semua yang direncanakan. Selain itu juga ditunjuk orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana kegiatan.

7. Implementasi Strategi

Setelah sebuah strategi diformulasikan, strategi tersebut harus dikembangkan secara logis dalam bentuk tindakan. Tahap inilah yang disebut dengan implementasi strategi. Masalah implementasi ini cukup rumit, oleh karena itu agar penerapan strategi organisasi dapat berhasil dengan baik, manajer harus memiliki gagasan yang jelas tentang isu-isu yang berbeda dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam tahap ini masalah struktur organisasi, budaya perusahaan dan pola kepemimpinan akan dibahas secara lebih mendalam.

Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Tindakan pengelolaan bermacammacam sumber daya organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber-sumber daya perusahaan (keuangan, manusia, peralatan dan lain-lain) melalui strategi yang dipilih. Implementasi strategi diperlukan untuk memperinci secara lebih jelas dan tepat bagaimana sesungguhnya pilihan strategi yang telah diambil direalisasikan.

8. Evaluasi dan Pengendalian Strategi

Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melaluinya aktifitas perusahaan dan hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan.

Proses evaluasi erat kaitannya dengan usaha pengendalian kegiatan yang sedang berjalan (Lawrance R. Jauch dan William F. Glueck) dalam buku Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan Edisi Ketiga. Ini biasanya dipandang sebagai kegiatan empat unsur yang saling berkaitan:

- Menggariskan sasaran prestasi kerja, standar, dan batas toleransi untuk tuuan, strategi, dan rencana pelaksanaan.
- Mengukur posisi yang sesungguhnya sehubungan dengan sasaran pada suatu waktu tertentu.
- c. Menganalisis penyimpangan dari batas toleransi yang dapat diterima.
- d. Melaksanakan modifikasi jika dirasa perlu atau layak.

Proses ini dapat meliputi berbagai dimensi penting bagi manajemen strategis. Yakni sejumlah aspek pengendalian berikut perlu dicapai menurut Rowe dan Carlson.

- a. Pengendalian manajemen, yang didasarkan pada prestasi dan data historis di masa lampau.
- b. Pengendalian waktu-nyata, yang memusatkan perhatian khusus pada aspek-aspek teknis pengendalian sehingga informasi yang aktual dapat diperoleh.
- c. Manajemen pelaksanaan, yang memusatkan perhatian pada keselarasan tujuan dan efektivitas organisasi.

- d. Pengendalian adaptif, yang berkaitan dengan penentuan cara yang paling cepat dan efektif untuk memberikan tanggapan terhadap perubahan.
- e. Pengendalian strategis, yang melibatkan cara mengantisipasi atau mengembangkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dari hasil yang diinginkan.

Hasil dari tahap pengendalian strategi ini akan sangat bermanfaat dan akan menjadi input untuk proses manajemen strategi perusahaan selanjutnya. Dengan demikian perusahaan diharapkan akan tetap memiliki daya saing yang berkelanjutan dalam persaingan. Karena strategi diimplementasikan dalam suatu lingkungan yang terus berubah. implementasi yang sukses menuntut pengendalian evaluasi pelaksanaan. Sehingga jika diperlukan dapat dilakukan tindakan-tindakan perbaikan yang tepat.

2.7 Dimensi Strategi

Menurut James Brian Quinn (Mintzberg, Lampel, Quinn, Ghoshal: 2003:3) strategi militer diplomatik dan analogi-analogi yang serupa dalam bidang lain menyediakan beberapa wawasan penting ke dalam dimensi dasar, sifat, dan desain strategi formal.

Pertama, strategi formal yang efektif mengandung tiga elemen penting:

1. Tujuan

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai oleh suatu organisasi/instansi. Tujuan merupakan salah satu dimensi yang dapat menciptakan sebuah strategi karena penetapan tujuan sangat berkaitan langsung dengan strategi yang akan digunakan oleh sebuah organisasi atau instansi dalam pencapaian tujuannya dimana ketika tujuan sudah ditetapkan maka kita dapat mengetahui strategi yang akan digunakan.

2. Kebijakan

Kebijakan merupakan rangkaian keputusan yang membimbing dan membatasi tindakan yang dilakukan. Kebijakan dibuat untuk menetapkan arah suatu tujuan yang ditetapkan sehingga pembuatan kebijakan lebih memudahkan untuk mengarahkan suatu organisasi atau instansi dalam menerapkan suatu strategi.

3. Program

Program merupakan urutan-urutan tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Program dimaksudkan untuk mengatur segala tindakan-tindakan yang akan dilakukan sehingga strategi yang akan diterapkan dapat terlaksana dengan maksimal. Strategi menentukan arah keseluruhan dan tindakan fokus organisasi, formulasinya tidak dapat dianggap sebagai generasi belaka dan keselarasan program untuk

memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pembangunan merupakan bagian integral dari strategi formulasi.

Kedua, strategi yang efektif mengembangkan beberapa konsep dan arah tujuan untuk memberikan kohesi, keseimbangan, dan fokus. Beberapa tujuan bersifat sementara, yang lain dilakukan hingga strategi berakhir. Beberapa biaya lebih perunit menguntungkan daripada yang lain, namun, sumber daya harus dialokasikan dalam pola yang menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendorong suatu keberhasilan terlepas dari rasio biaya / keuntungan relatif. Serta, unit organisasi harus dikoordinasikan dan tindakan dikendalikan untuk mendukung pola tujuan strategi keseluruhan.

Ketiga, kesepakatan strategi tidak hanya dengan ketidakprediksian tetapi juga dengan ketidaktahuan. Untuk strategi perusahaan besar, tidak ada analis yang dapat memprediksi cara di mana semua kekuatan berinteraksi satu sama lain, baik oleh alam atau emosi manusia, atau dimodifikasi oleh imajinasi dan tujuan cerdas lawan (Braybrooke dan Lindblom, 1963) dalam Mintzberg dkk (2003:15). Banyak yang telah mencatat bagaimana sistem skala besar dapat merespon (Forrester, 1971) dalam Mintzberg dkk (2003:15) tindakan rasional atau bagaimana serangkaian yang tampak aneh dapat bersekongkol untuk mencegah atau membantu keberhasilan (Putih, 1978; Lindblom, 1959).

Keempat, hanya organisasi seperti militer memiliki beberapa eselon grand, teater, daerah, pertempuran, infanteri, dan strategi artileri, sehingga organisasi yang kompleks lainnya harus memiliki sejumlah strategi hierarkis terkait dan saling mendukung (Vancil dan Lorange, 1975; Vancil, 1976). Setiap strategi tersebut harus lebih atau kurang lengkap dirinya sendiri, kongruen dengan tingkat dalam desentralisasi dimaksudkan. Namun setiap strategi harus dibentuk sebagai kohesif antara semua strategi organisasi besar yang akan menjadi tugask kepala setiap pekerja eksekutif, bahwa ada sarana yang sistematis untuk menguji setiap strategi komponen dan melihat bahwa itu memenuhi prinsip utama dari strategi yang terbentuk. (Minztberg dkk:2003).

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang strategi pengembangan pariwisata telah beberapa kali dilakukan, sebagaimana terlihat dalam tabel 2.1:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1	Beatrix Maesturi, 2018	Pola Kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam perwujudan Mamasa sebagai destinasi pariwisata di Sulawesi Barat	Mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Mamasa. Mengetahui dan menggambarkan pola kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam mewujudkan Mamasa sebagai Destinasi Pariwisata di Provinsi Sulawesi Barat.	Menggunakan analisis deskriptif	Upaya Pemerintah Daerah dalam membangun Kepariwisataan di Kabupaten Mamasa dilihat melalui Pembangunan Atraksi, Aksebilitas, dan Amenitas wisata. Upaya tersebut dapat dikatakan belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal karena masih ada beberapa kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kurang memadainya infrastruktur, dan minimnya regulasi yang mengatur penyelenggaraan Kepariwisataan di Kabupaten Mamasa. Kedua, Pola Kemitraan antara Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Mamasa sebagai Destinasi Pariwisata di Sulawesi Barat belum berjalan dengan baik.
2	M. Faruq Guntur Asmoro	Analisis Potensi Obyek Wisata Alam	Mengetahui potensi obyek wisata alam di Kecamatan Plaosan.	Teknik analisis yang digunakan adalah analisis skoring	Obyek wisata alam di Kecamatan Plaosan sebagian besar berstatus kurang potensial. Berdasarkan penilaian terhadap 3 variabel pada 8 obyek wisata alam yang terdapat di

	(2011)	Di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Tahun 2011.	Memberikan konsep arahan pengembangan obyek wisata alam yang tepat di Kecamatan Plaosan.	pada masing- masing variabel. Menggunakan model interaktif melalui seleksi data, penyajian data dan menyimpulkan data.	daerah penelitian menunjukkan terdapat 4 obyek wisata masuk dalam kelas kurang potensial, 2 obyek wisata masuk kelas cukup potensial dan 2 obyek wisata masuk kelas sangat potensial. Arahan pengembangan obyek wisata alam di Kecamatan Plaosan dibagi menjadi empat jenis, yaitu obyek wisata minat khusus (pendakian), obyek wisata keluarga, obyek wisata pemancingan dan obyek wisata jelajah alam/ petualangan.
3	Yanuar Sulistyani ngrum (2012)	Analisis Persebaran, Potensi dan Pengembangan Obyek Wisata Alam di Kabupaten Kebumen	Mengetahui persebaran dan pola persebaran obyek wisata alam di Kabupaten Kebumen. Mengetahui potensi obyek wisata alam di Kabupaten Kebumen. Mengetahui arah pengembangan obyek wisata alam di Kabupaten Kebumen.	Teknik analisis data yang digunakan adalah pemetaan, analisis tetangga terdekat, skoring, dan analisis SWOT.	Obyek wisata alam di Kabupaten Kebumen tersebar di tiga bentuklahan, yaitu bentuklahan solusional dengan pola persebaran mendekati mengelompok (cluster), bentuklahan marine dengan pola persebaran mendekati seragam dan bentuklahan struktural dengan pola persebaran mendekati random. Sebagian besar obyek wisata alam di Kabupaten Kebumen memiliki potensi sedang. Upaya pengembangan yang dapat dilakukan untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan adalah dengan menjadikan wilayah bentuklahan solusional sebagai kawasan wisata ekokarst, wilayah bentuklahan marin dijadikan kawasan wisata bahari, wilayah bentuklahan struktural dijadikan sebagai kawasan wisata dan konservasi, dan wilayah bentuklahan fluvial dikembangkan menjadi desa wisata.

4	Hugo Itamar, 2017	Strategi Pengembangan Pariwisata kabupaten Tanah Toraja	Mengetahui Strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Tanah Toraja Mengetahu Faktor pendukung dan penghambat pengembangan Pariwisata kabupaten Tanah Toraja	Analisis Seskriptif	Penelitian ini menggambarkan tentang strategi pengembangan pariwisata yang direncanakan dan dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata yaitu strategi dasar yang bersifat multi-plier effect, strategi terkait dengan pengelolaan interset pariwisata, strategi keterkaitan dan pengembangan produk, strategi pemantapan pemasaran, strategi pengembangan sumber daya manusia, strategi spasial pengembangan wisata, strategi pengembangan pariwisata bidang distribusi. Dimana dari 7 strategi ini telah dilaksanakan dalam waktu 2011-2016. Akan tetapi ada strategi yang belum berjalan maksimal sehingga hasil yang diinginkan belum tercapai dengan baik. Kemudian Alam, budaya, masyarakat, objek wisata, dan promosi pasar wisata menjadi pendukung pariwisata Tana Toraja. Akses jalan, sarana, sumber daya manusia, pera-turan dan landasan hukum, pengelolaan objek wisata ,menjadi faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja.
---	-------------------------	---	--	---------------------	--

Sumber : Data sekunder setelah diolah, 2018

2.9 Kerangka Pikir

Dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup masyarakat, kelestrarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Potensi pengembangan pariwisata Alam yang dimiliki Kabupaten Mamasa yang potensial untuk diantaranya adalah Air Terjun Liawan, Permandian Air Panas Kole, dan Air Terjun Sambabao.

Dengan menggunakan pendekatan Minztberg, dkk. menunjukkan bahwa Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Mamasa merupakan sebuah Strategi sebagai rencana. Adapun faktor-faktor penghambat strategi pengembangan pariwisata kabupaten Mamasa yaitu faktor sumberdaya manusia dan Angaran.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disusun dalam kerangka konsep sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dan teknik penelitian sebagai berikut :

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa sebagai satu-satunya kabupaten yang terletak di pegunungan dengan bentangan panorama alam dan kebudayaan yang unik dan mempesona, serta sebagai pusat destinasi pariwisata provinsi Sulawesi Barat.

3.2 Tipe penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang potensi dan strategi pemerintah daerah kabupaten Mamasa dalam mengembangkan pariwisata. Dasar penelitian yang digunakan adalah metode survei yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari sejumlah informan serta dokumen-dokumen dan studi literatur yang dianggap dapat memberikan bahan dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3 Data dan teknik pengumpulan data

3.3.1. Sumber Data

Data yang dugunakan di kelompokkan menjadi data primer dan data sekunder.

- Data Primer, data yang diperoleh dari hasil pertanyaan yang penulis lakukan berdasarkan pedoman yang telah dibuat.
- Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi, yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

Penggunaan data primer dan data sekunder secara bersama-sama dimaksudkan agar saling melengkapi yang disesuaikan dengan keperluan penelitian, selain itu hal ini dilakukan sekaligus untuk perbandingan data yang diperoleh.

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- A. Pengumpulan data primer
- Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian di lapangan.
- Wawancara, yaitu mengadakan pertemuan langsung dengan aparat pemerintahan baik yang memiliki jabatan struktural maupun

yang tidak, kemudian melakukan tanya jawab guna mendapatkan informasi yang akurat untuk di analisis dalam pembahasan.

B. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain :

- 1) Dokumen dari kantor terkait dengan penelitian ini
- Literatur yang diperoleh dari perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan dalam penelitian dan pembahasan Tesis.
- 3) Berbagai media cetak antara lain artikel-artikel dalam majalah, surat kabar dan dapat juga di peroleh dari internet.

3.4 Informan Penelitian

Informan merupakan orang-orang yang memiliki pemahaman atau bahkan orang-orang yang juga pelaku yang terlibat langsung dalam proses pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Mamasa. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa
- Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten
 Mamasa
- 3) Kepala Bidang Promosi dan Kesenian
- 4) Staf Dinas Pariwisata
- 5) Pengelolah Objek Wisata

- 6) Wisatawan
- 7) Masyarakat

3.5 Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik analisa kualitatif, yakni data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis yang ditunjang dengan data kuantitatif dan kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematika fakta-fakta dan data-data yang diperoleh. Serta hasilhasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.

3.6 Fokus Penelitian

Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap konsep-konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan Fokus Penelitian yaitu mengidentifikasi dan menganalisis strategi pengembangan pariwisata berdasarkan dimensi-dimensi strategi (Mintzberg, Lampel, Quinn, Ghoshal :2003) yaitu Tujuan, Kebijakan dan Program dan faktor-faktor penghambat strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Mamasa.

A. Tujuan

Tujuan yang dimaksud adalah hasil yang ingin dicapai Dinas Pariwisata terhadap pengembangan Wisata Alam di Kabupaten Mamasa.

B. Kebijakan

Kebijakan yang dimaksud adalah rangkaian keputusan yang membimbing dan membatasi tindakan yang dilakukan Dinas Pariwisata terhadap pengembangan kawasan Wisata Alam Kabupaten Mamasa

C. Program

Program yang dimaksud adalah berupa urutan-urutan tindakan yang dilakukan Dinas Pariwisata untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan strategi pengembangan Pariwisata kabupaten Mamasa serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi pengembangan pariwisata kabupaten Mamasa.

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Mamasa

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Mamasa

Kabupaten Mamasa merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dengan rangkaian sejarah pembentukannya yang cukup panjang. Dalam sejarah pembentukan kabupaten Mamasa, sejak memasuki masa kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri NIT (Negara Indonesia Timur) pada tanggal 17 Juli 1947 No.: BZ.2/1/17 di Mamasa diadakan serangkaian rapat yang diikuti para Kepala Distrik (Parengnge') dan Tokoh-Tokoh Masyarakat se-Onderafdeling Boven Binuang en Pitu Ulunna Salu. Rapat ini menjajaki kemungkinan dibentuknya suatu New Swapraja untuk daerah tersebut.

Dalam suatu rapat akbar di Mamasa pada tanggal 07 Juni 1948, setelah melalui perdebatan alot dan cukup lama yang dipimpin langsung Residen Celebes dari Makassar pada saat itu, maka ditetapkan nama Swapraja baru tersebut yaitu "Swapraja Kondosapata' dengan ibukotanya di Mamasa".

Pada tahun 1953 NIT ternyata dibubarkan berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan pasa saat itu, Swapraja Kondosapata' juga ikut bubar. Selanjutnya terbentuk Kewedanaan Mamasa yang periodenya berlangsung hingga tahun 1958. Pada masa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Kabupaten Daerah Tk. II Polewali Mamasa terbentuk. Seharusnya Kewedanaan Mamasa sudah menjadi Kabupaten Daerah Tk. II Mamasa pada saat itu setara dengan Kewedanaan Mamuju, Kewedanaan Majene sudah menjadi Kabupten tersendiri, namun kenyataannya yang Kewedanaan Mamasa digabung dengan Kewedanaan Polewali menjadi Kabupaten Daerah Tk. II Polewali Mamasa disingkat Kabupaten Polmas. Hal ini terjadi karena pada masa perubahan status Kewedanaan menjadi Kabupaten Daerah Tk. II pada tahun 1958, terjadi suatu masalah ke dalam antara Kewedanaan Polewali dan Kewedanaan Mamasa. Masalah ini memuncak pada tanggal 31 Agustus 1958, Kewedanaan Mamasa dikosongkan oleh petugas keamanan atas perintah atasannya di Polewali. Selain petugas keamanan yang meninggalkan Kewedanaan Mamasa, ikut pula pemerintahan sipil hijrah ke Polewali, sejak saat itulah hubungan Kewedanaan Mamasa dan Kewedanaan Polewali terputus total, baik lalulintas maupun pemerintahan, terlebih komunikasi. Pada saat disahkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, hubungan ke Mamasa masih terputus dan Kewedanaan Mamasa tidak memiliki pengetahuan tentang terbentuknya Kabupaten Polewali Mamasa.

Hubungan Polewali dan Mamasa baru mulai terbuka kembali pada tahun 1961 ketika itu Bupati Kabupaten Daerah Tk. II Polewali Mamasa yang pertama memerintah yaitu Andi Hasan Mangga.

Di tahun 1962, masyarakat ex Kewedanaan Mamasa kembali menuntut Daerah Tk. II Mamasa, namun banyak hambatan sehingga prosesnya agak lambat berjalan. Atas restu Bupati KDH Tk. II Polmas Abdullah Madjid, maka terbentuklah Panitia Penuntut Kabupaten Mamasa. Berdasarkan S.K. BKDH Tk. II Polmas Nomor: 06/SK/BP/1966 Tertanggal: 17 Mei 1966 dibentuk Perwakilan Panitia Penuntut kabupaten Daerah Tk. II di Makassar dengan Ketua: Abd. Djabbar, B.A., kemudian Perwakilan di Jakarta di bawah pimpinan Urbanus Poly Bombong (Anggota DPR-GR di Jakarta mewakili Partai Kristen Indonesia dari Mamasa).

Selanjutnya berdasarkan Surat Mandat Panitia Nomor: 08/M/BP/66
Tertanggal 09 Juli 1966 yang disetujui Bupati KDH Tk.II Polmas, Kapten
Infantri Abdullah Madjid, ditetapkan nama-nama delegasi yang akan
berangkat di tingkat pusat dalam rangka realisasi pembentukan
Kabupaten Daerah Tk. II Mamasa, sebagai berikut:

- 1. D. Tandipuang sebagai Ketua Delegasi
- 2. D. Pualillin sebagai Wakil Ketua Delegasi
- 3. J. Thumo' sebagai Anggota Delegasi
- 4. M. Lullulangi, B.A. sebagai Anggota Delegasi
- 5. Abd. Djabbar, B.A., sebagai Anggota Delegasi

6. F. Polopadang sebagai Anggota Delegasi

Sebagai realisasi di tingkat pusat, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Basuki Rahmat, menjanjikan sebagai berikut:

- Pemerintah Pusat tetap memperhatikan tuntutan masyarakat Mamasa untuk membentuk daerah otonom Tk. II Mamasa dengan ibukotanya di Mamasa, sambil menunggu ketentua lebih lanjut.
- Supaya BKDH Tk. II Polmas membentuk perwakilan BKDH Polmas di Mamasa untuk persiapan pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Mamasa.

Berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri R.I., maka terbentuklah Perwakilan BKDH Polmas di Mamasa dengan susunan personalianya sebagai berikut:

- 1) Tamajoe, Bupati Muda sebagai Kepala Perwakilan,
- 2) S. Matasak, Penata Tatapraja sebagai Anggota Perwakilan,
- 3) Paipinan, Penata Muda Tatapraja sebagai Anggota Perwakilan.

Selanjutnya berdasarkan SK BKDH Tk. II Polmas Nomor: 71/PD/1968 Tertanggal : 18 Juli 1968, personalia Perwakilan mengalami perubahan sebagai berikut:

1. S. Matasak, Penata tatapraja sebagai Ketua Perwakilan,

- 2. Y. Depparinding, Penata Muda Tatapraja sebagai Anggota Perwakilan,
- 3. Mangoli', Penata Muda Tatapraja sebagai Anggota Perwakilan,
- 4. Y. Puatipanna, Penata Muda Tatapraja sebagai Anggota Perwakilan.

Perwakilan BKDH Tk. II Polmas berlangsung hingga tahun 1971 dengan mengalami dua kali perubahan/pergantian personalia. Akhirnya dari tahun ke tahun tidak ada realisasi, kemudian vakum tanpa dibubarkan.

Perjuangan yang sama muncul di tahun 1987, melalui surat Panitia Penuntut Daerah Tk. II Mamasa Nomor. 08/Pn/II/88 Tertanggal 19 April 1988 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri R.I., Ketua DPR R.I., Gubernur KDH. Tk. I Sulsel, Ketua DPRD Tk. I Sulsel, Bupati KDH Polmas, Ketua DPRD Tk. II Polmas, tembusannya kepada para Menteri Kabinet R.I. terkait lainnya, namun realisasinya tidak ada.

Melalui perjalanan panjang dan berliku-liku, nampaknya masa reformasi Republik Indonesia membawa angin baik bagi ex. Kewedanaan Mamasa. Maka pada awal tahun 1999 mulai menghangat kembali tuntutan Kabupaten Mamasa dan realisasinya tertanggal 11 Maret 2002 di mana Kabupaten Mamasa terbentuk bersamaan dengan peningkatan status Administrasi Palopo menjadi Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2002 yang diundangkan di Jakarta tanggal 07 April 2002 ketika Megawati Soekarno Putri sebgai Presiden Republik

Indonesia menandatangani Undang-Undang tersebut, bersamaan pula dengan 20 Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia secara serempak dalam perjuangan yang sama.

4.1.2 Keadaan Geografis

Kabupaten Mamasa secara astronomis terletak di antara 2º39'216" - 3º19'288" LS dan 119º0'216" - 119º38'144" Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Mamasa adalah 3005,88 km2.Secara administratif menjadi 17 kecamatan, 13 Kelurahan, 125 Desa definitif dan 39 Desa Persiapan. Kecamatan Tabulahan adalah Kecamatan terluas di Kabupaten Mamasa dengan luas wilayah sebesar 534,14 km2 atau sekitar 18,44 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Mamasa. Sedangkan Rantebulahan Timur dengan luas 31,86 km2 adalah kecamatan dengan wilayah terkecil di Kabupaten Mamasa.

Keadaan topografi Kabupaten Mamasa bervariasi mulai dari dataran rendah, berbukit hingga bergunung-gunung dengan tingkat kemiringan yang sangat terjal. Bagian wilayah dengan kemiringan di atas 40% menempati luasan terbesar yaitu 238.670 Ha (78,74%) dan terdapat pada hampir semua kecamatan. Bagian wilayah yang memiliki tingkat kemiringan 0–8% menempati areal yang terkecil yaitu hanya sekitar 2.410 Ha atau 2,41% dari total luas wilayah Kabupaten Mamasa. Posisi dan Tinggi wilayah Kabupaten Mamasa per kecamatan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Posisi dan Tinggi Wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL)
Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa

Kecamatan	Bujur	Lintang	DPL(m)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumarorong	119°20'	3°10'	325 – 2.100
Messawa	119°20′	3°15'	300 – 1.750
Pana	119°35'	3°05'	325 – 2.325
Nosu	119°30'	3°10'	1.437 – 2.450
Tabang	119°30'	2°50'	700 – 2.750
Mamasa	119°25'	2°50'	1.025 – 3.000
Tanduk Kalua	119°15'	3°00'	1.050 – 2.000
Balla	119°15′	2°55'	1.100 – 1.875
Sesenapadang	119°20'	3°00'	1.300 – 2.600
Tawalian	119°25′	2°55'	1.200 – 2.275
Mambi	119°10'	3°00'	175 – 1.550
Bambang	119°15	2°55	950 – 1.475
Rantebulahan timur	119°10′	3°00'	850 – 2.725
Mehalan	119°15'	2°55'	650 – 655
Arale	119°10′	2°50'	500 – 2.350
Buntu malangka	119°15'	2°55'	650 – 950
Tabulahan	119°10'	2°45'	100 – 2.950

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamasa tahun 2014

Dari data tabel 4.1 menunjukkan bahwa posisi dan tinggi wilayah diatas permukaan laut (DPL) menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa adalah Kecamatan Sesenapadang yang paling tinggi di atas permukaan laut dengan jumlah 1.300-2.600m dan posisi wilayah yang paling rendah yaitu Kecamatan Mehalaan dengan jumlah 650-655m.

Adapun batas wilayah administratif Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kec. Kalumpang dan Kec. Kalukku Kab. Mamuju

• Sebelah Selatan : Kec. Polewali, Kec. Matangnga, Kec. Wonomulyo

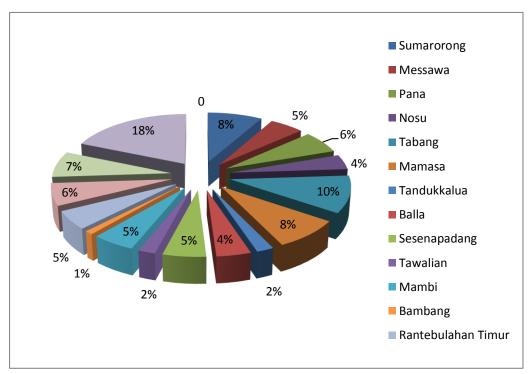
Sebelah Barat :Kec.Mamuju dan Kec. Tapalang Kab. Mamuju Kec.
 Malunda, Majene

Sebelah Timur : Kab. Tana Toraja & Kab. Pinrang Prov.Sulawesi
 Selatan

Analisis pada aspek geografi memberikan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi aspek demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok. Luas Wilayah Kabupaten Mamasa adalah 3005,88 km2, yang terbagi menjadi 17 kecamatan, 13 Kelurahan, 125 Desa definitif dan 39 Desa Persiapan. Kecamatan Tabulahan adalah Kecamatan terluas di Kabupaten Mamasa dengan luas wilayah sebesar 534,14 km2 atau

sekitar 18,44 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Mamasa. Sedangkan Rantebulahan Timur dengan luas 31,86 km2 adalah kecamatan dengan wilayah terkecil di Kabupaten Mamasa. Persentase luas wilayah kecamatan terhadap luas wilayah Kabupaten Mamasa disajikan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.1
Persentase Luas Wilayah Kecamatan terhadap Luas
Kabupaten



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa Tahun 2014

Berdasarkan gambar 4.1 presentase luas wilayah kecamatan terhadap luas kabupaten yaitu kecamatan yang paling luas yaitu Kecamatan Buntumalangka dengan persentase luas wilayah 18 % sedangkan kecamatan yang paling sempit yaitu Kecamatan Bambang dengan persentase 1 %.

4.1.3 Iklim dan Cuaca

Secara umum wilayah Kabupaten Mamasa tergolong iklim tropis basah dengan suhu udara minimum 230 C dan suhu maksimum rata-rata berkisar 300 C. Kecepatan angin rata-rata setiap tahunnya 77–85 km/jam. Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Mamasa bervariasi sesuai dengan geografisnya. Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt Ferguson (1951) adalah sebagai berikut:

- Wilayah Kecamatan Mamasa, Kecamatan Sesena Padang, Kecamatan Tawalian, Kecamatan Balla dan Kecamatan Tanduk Kalua termasuk dalam zona agriklimat D1 dengan curah hujan rata-rata sekitar 2.140 mm/tahun dan bulan basah sebanyak 11 bulan.
- 2. Wilayah Kecamatan Sumarorong dan Kecamatan Messawa termasuk dalam zona agriklimat A1 dengan curah hujan ratarata sekitar 3.155 mm/tahun dan bulan basah sebanyak 12 bulan.
- Wilayah Kecamatan Pana', Kecamatan Nosu, dan Kecamatan Tabangtermasuk dalam zona agriklimat D2 dengan curah hujan rata sebesar 3.487 mm/tahun dan bulan basah sebanyak 11 bulan.

Wilayah Kecamatan Mambi, Kecamatan Bambang, Kecamatan rantebulahan Timur, Kecamatan Aralle dan Kecamatan Tabulahan beradapada Zona agriklimat B1 dengan curah hujan rata-rata 2.585 mm/tahun dan bulan basah sebanyak 12 bulan.

4.1.4 Sosial Budaya

Penduduk masyarakat kabupaten Mamasa memiliki rasa nasionalis dan kebersamaan yang tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan membuat suatu perkumpulan/ organisasi dalam usaha menjadikan kabupaten Mamasa sebagai daerah Otonom pada tahun 2004. Selain itu masyarakat Kabupaten Mamasa terbuka terhadap orang-orang pendatang, masyarakat masih kental dengan gotong rotong, tolong menolong dan kebersamaan, hal ini terbukti dalam segala aktifitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menolong mereka tidak melihat suku, ras dan agama karena mereka menganggap semuanya adalah saudara, terbukti dengan beraneka ragam suku, bangsa dan agama yang tinggal di Kabupaten Mamasa. Dari segi budaya masyarakat Mamasa masih memegang adat nenek moyangnya, tetapi mereka tidak menutup terhadap adat kebiasaan suku-suku yang lain.

4.1.5 Keadaan Demografi

Struktur Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Mamasa tahun 2012 berjumlah 142.292 jiwa, meningkat sekitar 3.876 jiwa dari tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 2,32 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam datel 4.2

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Mamasa Tahun 2014

NO.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Sumarorong	5.007	4.956	9.963
2	Messawa	3.721	3.575	7.296
3	Pana	4.555	4.314	8.869
4	Nosu	2.291	2.181	4.472
5	Tabang	3.136	3.004	6.140
6	Mamasa	11.860	11.906	23.766
7	Tandukalau	5.303	5.241	6.337
8	Balla	3.197	3.140	7.996
9	Sesenapadang	3.991	4.005	6.469
10	Tawalian	3.240	3.229	9.666
11	Mambi	4.884	4.782	10.747
12	Bambang	5.388	5.359	5.961
13	Rantebulahan timur	3.025	2.936	4.056
14	Malahaan	2.118	1.938	6.843
15	Arelle	3.496	3.347	6.992
16	Buntu malangka	3.510	3.482	10.175
17	Tabulahan	5.279	4.896	10.175
18	Jumlah	74.001	72.291	146.292

Sumber: BPS Kabupaten Mamasa Tahun 2014

Berdasarkan tabel 4.2 di atas tentang jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Mamasa tahun 2014 yaitu kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Mamasa dengan jumlah Laki-laki 11.860 jiwa dan jumlah Perempuan 11.906 jiwa dengan total 23.766 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya yaitu Kecamatan Rantebulahan Timur dengan jumlah Laki-laki 3.025 jiwa dan jumlah Perempuan 2.936 jiwa.

Pengelompokan Penduduk Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin berdasarkan Penduduk Kabupaten Mamasa pada tahun 2014, hasilestimasi Sensus Penduduk sekitar 146.292 jiwa yang terdiri dari 74.001laki-laki dan 72.291 perempuan. Pada pertengahan tahun 2010penduduk Kabupaten Mamasa meningkat menjadi sekitar 140.082 jiwadengan komposisi 71.089 penduduk laki-laki dan 68.993 pendudukperempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Mamasa pada tahun 2012 meningkatmenjadi 142.416 jiwa yang terdiri 72.273 laki-laki dan 70.143 perempuan. Sex ratio Kabupaten Mamasa pada tahun 2012 sebesar 103 yang artinyaterdapat sekitar 103 orang laki-laki diantara 100 perempuan.

4.1.6 Visi Misi Kabupaten Mamasa

Visi pembangunan daerah Kabupaten Mamasa sebagaimana termuat dalam RPJMD 2014–2018 adalah "Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri Dalam Kehidupan Yang Berkeadilan, Demokratis Dan Sejahtera"

Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Mamasa selama tahun 2014-2018 dengan memuat beberapa pikiran pokok sebagai berikut :

- Kemandirian adalah cita-cita otonomi daerah karena merupakan pilar kemandirian bangsa, gambaran kesejahteraan, dan eksistensi daerah serta merupakan prasyarat keberhasilan pemerintahan di daerah.
- Keadilan adalah dambaan setiap insan selaku tata cara mewujudkan harmoni hidup bahkan merupakan harkat dan martabat kemanusiaan.
- Demokratisasi dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat adalah jaminan kebebasan tanggungjawab dan partisipasi aktif dalam segala bidang kehidupan.
- 4) Kesejahteraan merupakan tujuan hidup masyarakat sebagaimana cita-cita bersama yang dapat terwujud dalam kerangka keseimbangan yang menjunjung tinggi kebersamaan.

5) Mewujudkan Pemerintahan yang baik menjadi prasyarat mutlak guna menjamin terselenggaranya pelayanan masyarakat secara optimal.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan visi tersebut, maka misi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut :

 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan Berkelanjutan

Misi mewujudkan kemandirian ekonomi selaras dengan salah satu pokok visi yaitu "Mandiri." Kemandirian ekonomi berarti kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat dalam sektor perekonomian. Berbasis ekonomi kerakyatan mengandung pengertian bahwa kemandirian ekonomi pemerintah daerah didukung oleh tangguhnya ekonomi dapat dilakukan melalui peningkatan masyarakat. vang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk menggali potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi strategis dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara adil dan berkelanjutan. Dengan berbasis ekonomi kerakyatan, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai atau meningkat. Sedangkan prinsip dari pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan pemanfaatan Sumber

Daya Alam yang tersedia tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Misi pertama ini sejalan dengan skala prioritas RPJMD ke-3 (2014-2018) yang terdapat dalam RPJPD Mamasa (2005-2025) yaitu kondisi terus berkembangnya UMKM dan Koperasi yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Misi pertama ini mencita-citakan terwujudnya pemerintahan dan masyarakat yang mandiri, berdikari dan tidak bergantung pada pemerintah atau pihak lain.

2) Menumbuhkembangkan Iklim Investasi yang Kondusif

Misi menumbuhkembangkan iklim investasi yang kondusif sejalan dengan skala prioritas RPJMD ke-3 (2013-2018) yang terdapat dalam RPJPD Mamasa (2005-2025) yaitu kondisi terus meningkatnya investasi-penanaman modal di berbagai sektor baik yang berasal dari domestik maupun luar negeri. Perekonomian daerah akan mantap jika didukung oleh iklim investasi yang kondusif yang dapat memberikan daya tarik bagi investor baik investor domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya. Sehingga, dengan tumbuhnya iklim usaha yang kondusif diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian daerah.

3) Menyelenggarakan / Menyediakan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang Terjangkau, Merata dan Berkualitas

Aspek pendidikan dan kesehatan merupakan aspek dasar yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Pendidikan dan kesehatan

yang diselenggarakan adalah yang berkeadilan dan merata, dalam arti semua warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, terjangkau dan berkualitas. Misi ketiga ini sejalan dengan skala prioritas RPJMD ke-3 (2014-2018) yang terdapat dalam RPJPD Mamasa (2005-2025) yaitu kondisi terus meningkatnya kualitas SDM, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu faktor penentu kemajuan suatu daerah adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan tingkat kesehatan. Misi ketiga ini mencita-citakan meningkatnya kualitas SDM Mamasa dan terjaganya kesehatan masyarakat.

4) Membangun Infrastruktur yang Memadai dan Mendukung Kegiatan Perekonomian

Upaya pemenuhan pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan akan berjalan dengan baik jika didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai merupakan hal penting yang harus diupayakan oleh pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur yang memadai di segala bidang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah.

Mewujudkan Mamasa sebagai Daerah Tujuan Wisata (Tourism Destination)

Misi ini mencita-citakan Kabupaten Mamasa pada tahun 2018 menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang paling diminati baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan misi ini diharapkan Kabupaten Mamasa akan memiliki obyek wisata unggulan, serta obyek wisata tradisional/potensial lainnya yang tertata, sehingga akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Prima melalui Penerapan
 Good Governance dan Clean Government

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan oleh instansi, lembaga atau organisasi yang memberikan layanan kepada publik atau masyarakat sebagai pelanggan, dengan memperhatikan aturan atau prosedur yang ditetapkan serta dengan memenuhi standar minimal layanannya, guna menciptakan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Misi menyelenggarakan pelayanan publik yang prima merupakan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan memuaskan masyarakat diperlukan tata kelola pemerintahan yangbaik. Penerapan prinsip good governance dan clean government diharapkan mampu memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat.

4.1.7 Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa

Dinas Pariwisata Kabaupaten Mamasa merupakan bagian dari dinas daerah yang bertugas sebagai unsur pelaksanaan daerah dalam menjalankan roda pembangunan dan pemerintah daerah di sektor pariwisata. Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan bidang kepariwisataan Kabupaten Mamasa maka, ditetapkan visi yaitu: "Menjadikan Mamasa Sebagai Daerah Tujuan Pariwisata Unggulan di Provinsi Sulawesi Barat"

Dengan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa sebagai berikut :

- Menjadikan Mambulilling sebagai Brinding Image Pariwisata
 Mamasa yang merupakan kawasan strategis untuk menyaksikan sunrise, sunset dan city view melalui Pembangunan dan Penataan
 Sarana dan Prasarana Wisata di Kawasan Gunung Mambulilling;
- Membangun kerjasama masyarakat dan SKPD terkait untuk mengembalikan Citra Mamasa dengan julukan "Kota Kembang" yang sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda baik di Indonesia maupun di luar negeri utamanya di Negara-negara Eropa;
- Meningkatkan pelestarian nilai-nilai Seni, Budaya dan kearifan lokal sebagai warisan nenek moyang dalam upaya peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

- Mensosialisasikan Sapta Pesona (Aman, Tertib, Bersih, Rapi,
 Indah, Sejuk dan Kenagan) menuju masyarakat Sadar Wisata
- Mendorong pertumbuhan unit usaha Ekonomi Kreatif sebagai Industri Pariwisata melalui Pembinaan Industri-industri Kerajinan, serta mengundang investor untuk berinvestasi di bidang pariwisata;
- Mewujudkan kerjasama lintas sektoral dengan SKPD terkait dan stake holder dibidang kepariwisataan;
- Meningkatkan Promosi dan pemasaran melalui penyelenggaraan Festifal Seni Budaya Daerah melaui tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional; dan
- Meningkatkan Kulitas SDM Aparatur dan Pelaku-pelaku pariwisata dengan mengikuti Pelatihan-pelatihan baik di dalam maupun di luar daerah;

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009, tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata kabupaten Mamasa adalah melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata
- Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pariwisata

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata yang meliputi kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran wisata.
- 4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi Dinas Daerah, struktur Organisasi Dinas kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan Pelaporan Program dan PPK
- c. Bidang Promosi dan Kesenian membawakan membawahi :
 - 1. Seksi Promosi dan Pemasaran
 - 2. Seksi Pengembangan Kesenian dan Film
 - 3. Seksi Informasi Pariwisata
- d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - 2. Seksi Evaluasi Pengawasan dan Sarana Wisata
 - 3. Seksi Pemanfaatan Sarana Wisata
- e. Bidang Investasi dan Pariwisata membawahi
 - Seksi Investasi dan Bina Mitra
 - 2. Seksi Industri Pariwisata

3. Seksi Evaluasi dan Pengawasan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.8 Sumber Daya Manusia pada Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa

Sumber daya Manusia merupakan kunci kesuksesan suatu organisasi. Suatu organisasi akan berjalan dengan baik jika ditunjang dengan kualifikasi dan kompetensi sumberdaya manusia yang memadai. Adapun sumberdaya yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa berdasarkan jenis kelamin dan dan jabatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin, jabatan/eselon

Jabatan / Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Eselon I/c	1	-	1
Eselon II/a	1	1	2
Eselon II/c	4	2	6
Eselon III/a	4	2	6
Eselon III/b	4	2	6
Eselon III/c	3	5	8
Eselon III/d	3	3	6
Eselon IV/b	1	1	2
Jumlah	21	16	37

Sumber: Data sekunder setelah diolah, 2018

Pada table 4.3 diatas, Dari 37 orang staf Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa terbanyak golongan III dengan jumlah pegawai 26 orang dan diikuti oleh golongan II sebanyak 8 orang, golongan IV sebanyak 2 orang, dan golongan 1 sebanyak 1 orang pegawai. Dari data kepegawaian tersebut menunjukkan bahwa pangkat dan golongan yang ada telah memadai untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Namun disisi lain perlu dilakukan penambahan pegawai dengan mempertimbangkan kompetensi dan kualifikasi dumberdaya yang ada agar program yang dirancang dapat tercapai.

Tabel 4.4

Jumlah Pegawai berdasarkan distribusi pada bidang dan sekretariat

r			
Bidang	Laki-Laki	Perempaun	Jumlah
Sekretariat	10	6	16
Promosi dan Kesenian	4	3	7
Pengembangan Destinasi Pariwisata	3	4	7
Investasi, Pariwisata	5	2	7
Jumlah	22	15	37

Sumber: Data Sekunder setelah diolah, 2018

Dari tebet 4.4 tersebut menunjukkan bahwa dari 37 pegawai yang ada jumlah pegawai terbanyak ada di sekretariat yaitu 16 pegawai,

sedangkan pada bidang promosi dan kesenian, bidang pengembangan destinasi pariwisata, bidang investasi wisata, masing-masing berjumlah 7 pegawai. Pembagian tugas kepada setiap bidang merupakan salah satu strategi dalam mencapai tujuan organisasi. Pembagian ini didasari oleh beban kerja masing- masing bidang dengan mempertimbangkan latar belakang masing- masing pegawai. Dinas pariwisata dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sejumlah pegawai kontrak yang digambarkan dalam table 4.5 berikut:

Tabel 4.5

Jumlah Pengawai kontrak kerja berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
S1	1	-	1
D3	-	-	-
D1	-	-	-
SLTA	10	12	22
SLTP	-	-	-
SD	-	-	-
Jumlah	11	12	23

Sumber: Data sekunder setelah diolah, 2018

Selain Pewawai Negeri Sipil, Dinas Pariwisata juga di bantu oleh pegawai kontrak dengan jumlah 23 orang dengan kualifikasi pendidikan

Strata 1 sebanyak 1 orang dan SLTA sebanyak 22 orang. Pegawai kontrak ini sangat membantu jalannya roda organisasi khususnya dalam bidang administrasi.

4.1.9 Potensi Pariwisata Alam Kabupaten Mamasa

Kabupaten Mamasa yang berada pada ketinggian 100 – 3.000 mdpl memiliki keindahan alam yang masih *Alami* sehingga sangat potensial bagi pengembangan pariwisata. Pesona keindahan alam sudah dapat dinikmati sejak pertama kali memasuki wilayah Kabupaten Mamasa. Pada hampir seluruh bagian wilayah Kabupaten Mamasa, dapat dijumpai bukit-bukit yang hijau menjulang, air sungai yang mengalir, serta udara khas pegunungan yang menghadirkan kesejukan jauh dari polusi udara. Kabupaten Mamasa yang terletak pada jantung gugusan Pegunungan Quarles di bagian barat Pulau Sulawesi memiliki deretan gunung dan bukit yang menyimpan banyak pesona wisata, antara lain Gunung Gandang Dewata dengan ketinggian 3.037 mdpl di Kecamatan Tabulahan sebagai gunung tertinggi di Kabupaten Mamasa, sekaligus tertinggi kedua di Pulau Sulawesi dan dikenal penuh misteri serta memiliki medan tempuh sangat menantang bagi para pendaki gunung dan pecinta alam yang datang untuk menaklukannya. Selanjutnya, Gunung Mambulilling dengan ketinggian 2.573 mdpl di Kecamatan Mamasa dapat terlihat begitu jelas dari pusat ibukota kabupaten yang memiliki kondisi medan lebih mudah sehingga banyak didaki oleh pengunjung dan masyarakat sekitar. Ada pun

Bukit Buntu Mussa di Kecamatan Balla yang merupakan lokasi terbaik untuk melihat deretan beratus rumah tradisional Mamasa di perkampungan Balla Peu. Selain itu juga terdapat Bukit Marudinding di Kecamatan Sesenapadang, Gunung Sareong di Kecamatan Sumarorong, Gunung Pasapa' di Kecamatan Bambang, dan Bukit Tadokalua di Kecamatan Tabang.

Pegunungan di Kabupaten Mamasa merupakan hulu dari banyak aliran sungai besar, antara lain Sungai Mamasa, Sungai Masuppu, Sungai Mambi, Sungai Aralle, dan Sungai Liawan yang menyimpan potensi wisata minat khusus petualangan tirta, seperti rafting dan river tubing, meskipun wisata jenis ini membutuhkan keterampilan teknis dan sarana keselamatan yang memadai bagi peminatnya. Sepanjang aliran sungai di Kabupaten Mamasa juga tersebar banyak air terjun yang sebagian di antaranya sudah dikelola sebagai obyek wisata. Air Terjun Liawan di Kecamatan Sumarorong, merupakan obyek pemandian alam di dalam kawasan hutan lindung Gunung Sareong yang sudah dilengkapi fasilitas sarana wisata berupa penginapan dan pondok-pondok wisata. Air Terjun Sambabo di Desa Ulumambi Kecamatan Bambang yang memiliki tinggi ±300 m termasuk sebagai air terjun tertinggi di Pulau Sulawesi. Air Terjun Mambulilling yang terletak di salah satu lembah Gunung Mambulilling dapat dilihat jelas keindahannya dengan mata telanjang dari pusat Kota Mamasa, sementara Air Terjun Parak di Kecamatan Tawalian dan Air Terjun Minanga di Sesenapadang memiliki akses yang cukup mudah ditempuh dari ibukota kabupaten. Beberapa obyek wisata air terjun lain yang terdapat di Kabupaten Mamasa di antaranya Air Terjun Sollokan di Kecamatan Messawa, Air Terjun Tambuk Manuk di Kecamatan Balla, dan Air Terjun Rimbe di Kecamatan Nosu. Tidak hanya air terjun, Kabupaten Mamasa juga memiliki banyak potensi mata air panas. Keberadaan mata air panas alami ini merupakan peluang besar untuk mengembangkan wisata kebugaran dan kesehatan, apalagi mengingat Kabupaten Mamasa merupakan daerah yang bersuhu dingin. Beberapa mata air panas yang sudah dikembangkan menjadi obyek wisata pemandian antara lain Pemandian Air Panas Kole, Rante Katoan, Rante-rante dan Nusantara di Kecamatan Mamasa; Pemandian Air Panas Uhailanu di Kecamatan Aralle; Pemandian Air Panas Tamalanti' di Kecamatan Tanduk Kalua' dan Pemandian Air Panas Malimbong di Kecamatan Messawa. Sementara potensi air panas alami yang masih belum dikembangkan terdapat di Desa Osango Kecamatan Mamasa, Rante Kamiri di Kecamatan Tawalian, Indo Banua di Kecamatan Mambi, Rante Berang di Kecamatan Buntu Malangka. Adapun sebaran objek wisata potensial dapat dilihat dalam tabel 4.6.

Tabel 4.6 Objek Wisata Potensial Kabupaten Mamasa

					TADATO	
NO	NAMA OBJEK WISATA	LOKASI	FASILITAS YANG DIMILIKI	JENIS OBJEK	JARAK DARI IBUKO TA	KET
1	Air Terjun Liawan	Desa Tadisi Kec. Sumarorong	Gazebo,Perahu Karet, Panggung Hiburan, MCK, rumah pohon, Villa, ruang pertemuan,	Wisata Alam	34 KM	Menggunakan Roda 4 atau 2
2	Gunung Mambulilling Lintas	Desa Mambulilling Kec. Mamasa	-	Wisata Alam	9 KM	Menggunakan Roda 4 atau 2
3	Air Terjun Mambulilling	Desa Mambulilling Kec. Mamasa	-	Wisata Alam	7 KM	Menggunakan Roda 4 atau 2
5	Air Panas Kanan Kole	Desa Rambusaratu Kec. Mamasa	Gazebo, Kolam Renang, kamar ganti dan MCK	Wisata Alam	30 KM	Menggunakan Roda 2
6	Air Panas Buntu Kasisi	Desa Osango Kec. Mamasa	-	Wisata Alam	1 KM	Menggunakan Roda 4 atau 2
7	Air Panas Rante Katoan	Desa Osango Kec. Mamasa	-	Wisata Bahari	1 KM	Menggunakan Roda 4 atau 2
8	Air Panas Pangkali	Desa Rambusaratu Kec. Mamasa	-	Wisata Alam	2 KM	-
9	Air Panas/Kanan Malimbong	Desa Malimbong Kec. Messawa	Gazebo, Kolam Renang, kamar ganti dan MCK		42 KM	Menggunakan Roda 4 atau 2
10	Sungai Mamasa	Kab. Mamasa	Perahu Karet	Wisata Alam	100 M	Menggunakan Roda 4 atau 2
11	Air Terjun Parak	Desa Tawalian Timur Kec. Tawalian	-	Wisata Alam	8 KM	-
12	Puncak Mussa	Desa Balla Tumuka Kec. Balla	-	Wisata Alam	19,5 KM	-
13	Air Terjun Sambabo	Desa Ulu Mambi Kec. Bambang	-	Wisata Alam	22 KM	-

Sumber: Data Sekunder Dinas Pariwisata setelah diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.6, maka dapat terlihat beberapa objek potensial yang sudah memiliki fasilitas dan dikelolah oleh pemerintah. Meskipun memiliki banyak potensi namun saat ini pengelolaan belum dapat dilakukan dengan maksimal karena keterbatasan anggaran untuk pengembangan pariwisata. Dari sejumlah objek wisata tersebut ada dua objek wisata yang sudah dikelolah oleh pemerintah dan memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah yaitu objek wisata air terjun Liawan di kecamatan Sumarorong, dan objek Wisata Permandian air panas di Kecamatan Messawa.

4.2 Strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Mamasa

Berdasarkan fokus masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dilakukan identifikasi strategi berdasarkan pendekatan yang Dimensi Strategi menurut Henry Mintzberg, Joseph Lampel, James Brian Quinn, dan Sumantra Ghoshal (2003) dalam buku *The Strategy Process* yaitu: Tujuan, Kebijakan dan Program yang akan menghasilkan suatu strategi, yakni sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai suatu organisasi/instansi. Penetapan tujuan dinas pariwisata kabupaten Mamasa bedasarkan isu-isu strategis. Tujuan pengembangan pariwisata menggambarkan strategi yang ingin dicapai. Secara umum, tujuan pengembangan Pariwisata Kabupaten Mamasa, sebagaimana tertuang

dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut :

- Terkelolanya seluruh potensi pariwisata secara lebih profesional dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan industri kepariwisataan yang sejalan dengan kepentingan penataan ruang, peningkatan pendapatan asli daerah, pengembangan seni dan budaya daerah serta pelestarian lingkungan;
- Menjadikan Kabupaten Mamasa masuk dalam Kawasan Strategis
 Pariwisata Nasional (KSPN) atau Kawasan Pengembangan
 Pariwisata Nasional (KPPN).
- Mempertahankan Kabupaten Mamasa sebagai primadona dan Destinasi Wisata Unggulan di Provinsi Sulawesi Barat;
- Memperluas kesempatan berusaha, lapangan kerja dan mendorong industri lokal dalam peningkatan kerajinan khas Mamasa berbasis penggunaan bahan baku lokal;
- Menjadikan kegiatan / event pariwisata sebagai simpul kegiatan masyarakat dan pemerintah; dan
- Menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya yang dilandasi nilai-nilai agama.

Pada dasarnya tujuan pengembangan pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi pemerintah, wisatawan dan terutama warga/masyarakat setempat. Dengan pengembangan yang

dilakukan memberikan manfaat yang sangat besar terutama masyarakat setempat melalui peningkatan ekonomi yang mereka dapatkan.

B. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian keputusan yang membimbing dan membatasi tindakan yang dilakukan. Kebijakan pembangunan Pariwisata Nasional saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, serta Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisaataan Nasional. RIPPARNAS ini berlaku mulai dari 2011-2025. Selayaknya perencanaan untuk ditingkat objek Kabupaten atau kota pun perlu mengacu pada undang-undang kepariwisataan dan RIPPARNAS yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Kabupaten Mamasa berdasarkan pada RIPPARNAS belum ditetapkan sebagai salah satu dari Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) maupun Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Tidak dicantumkannya Kabupaten Mamasa tersebut menyebankan kerugian bagi Pariwisata di Kabupaten Mamasa. Salah satu kerugian yang tergambar paling nyata adalah Kabupaten Mamasa tidak memperoleh prioritas dalam berbagai kebijakan program pembangunan kepariwisataan nasional berdasarkan RIPPARNAS pasal 18 yaitu sebagai berikut :

- 1. Perwilayahan Pembangunan DPN;
- Pembangunan Daya Tarik Wisata;

- 3. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas
 Pariwisata;
- 5. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
- 6. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Kebijakan tersebut sejalan dengan yang disampaikan kepala dinas pariwisata bahwa :

"Salahsatu kendala yang kita hadapi adalah tidak terdaftarnya kabupaten Mamasa sebagai salah satu daerah Destinasi Pariwisata Nasional maupun Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dikarenakan produk pariwisata yang sudah dimiliki oleh Kabupaten Mamasa saat ini masih kurang dikenal kualitasnya secara nasional dan internasional, serta belum memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung secara optimal pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan".

(wawancara tanggal 19 Juli 2018)

Kebijakan inilah yang kemudian membatasi pemerintah untuk mengucurkan DAK untuk pengembangan pariwisata.

Tinjauan Kabupaten Mamasa dalam Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Barat ditelaah melalui Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Sulawesi Barat yang sekaligus salah satu pedoman utama penyusunan RIPPARDA Kabupaten Mamasa, mengingat RIPPARDA Provinsi Sulawesi Barat mengakomodir isu-isu strategis dan perkembangan terbaru kepariwisataan Sulawesi Barat

secara terintegrasi dan sinergis antar kepentingan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kabupaten Mamasa ditetapkan sebagai daerah Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Sulawesi Barat melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No. 15 Tahun 2008. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamasa 2005–2025, pembangunan sektor pariwisata juga belum dicantumkan secara eksplisit dalam visi-misi yang dicanangkan. Pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Mamasa memperoleh posisi penting setelah secara dicantumkan visi-misi eksplisit sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014–2018. Meskipun sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap perekonomian, tetapi dalam ukuran nilai pendapatan sampai saat ini pariwisata belum termasuk dalam sektor-sektor utama perekonomian Kabupaten Adapun penggerak Mamasa. visi pembangunan jangka menengah yang dimiliki Kabupaten Mamasa tersebut adalah: "Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri Dalam Kehidupan Yang Berkeadilan, Demokratis Dan Sejahtera"

Untuk menunjang visi Kabupaten Mamasa, formulasi misi atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan pembangunan berkelanjutan.
- Menumbuhkembangkan iklim investasi yang kondusif.
- Menyelenggarakan/menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, merata dan berkualitas.
- Membangun infrastruktur yang memadai dan mendukung kegiatan perekonomian.
- Mewujudkan Mamasa sebagai Daerah Tujuan Wisata (*Tourism Destination*).
- 6. Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Prima melalui Penerapan Good Governance dan Clean Government.

Pencantuman sektor pariwisata secara eksplisit dalam visi-misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamasa menunjukkan bahwa Kabupaten Mamasa berkomitmen menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan dalam membangun daya saing perekonomian masyarakat. Visi-misi tersebut juga menyiratkan harapan agar daya saing ekonomi sektor pariwisata mampu semakin tumbuh dan berkembang dalam kerangka pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Mamasa.

C. Program

Dalam penelitian yang dilakukan strategi pengembangan pariwisataprogram pengembangan pariwisata mengacu kepada Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata kabupaten Mamasa dan difokuskan pada program pengembangan pariwisata Alam sebagai wisata unggulan kabupaten Mamasa, sehingga teridentifikasi strategi sebagai berikut :

1. Strategi Pengembangan Produk Wisata, :

Menata, mengembangkan dan mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai selling value (nilai jual) secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara;

- 2. Strategi pemasaran dan promosi pariwisata, meliputi :
 - Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi serta kualitas promosi yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh semua hal tentang produk wisata yang ada dan siap jual;
 - 2. Meningkatkan peran serta biro perjalanan wisata dan jasa usaha lainnya untuk menjual produk wisata daerah; dan
 - Meningkatkan "sadar wisata" dan sapta pesona di kalangan para pejabat, pengusaha dan masyarakat, agar tumbuh kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan dan kearifan lokal;
- Strategi pengembangan prasarana untuk menunjang kegiatan pariwisata :

Pemenuhan kebutuhan prasarana pariwisata secara bertahap diusahakan pada objek-objek dan daya tarik wisata unggulan atau yang sudah berkembang yang seterusnya menyebar ke setiap objek dan daya tarik wisata lainnya yang sedang dalam tahap pengembangan dan penataan;

Berdasarkan Tujuan, Kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa dengan mengacu kepada pendekatan dimensi strategi yang dikemukakan oleh Mitzberg,dkk (2003) yakni : Tujuan, Kebijakan dan Program . Maka penulis menyimpulkan bahwa strategi yang digunakan Dinas Pariwisata terhadap pengembangan Pariwisata adalah Strategi sebagai Rencana, karena seperti yang kita lihat Kepala Dinas Pariwisata selaku yang bertanggung jawab penuh terhadap segala urusan kepariwisataan yang menetapkan arah organisasi menjadi lebih baik dengan berbagai perencanaan yang disusun secara matang dan dikembangkan secara sadar dan sengaja. Adapun strategi yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1. Strategi Pengembangan Produk Wisata
- 2. Strategi Pemasaran dan Promosi
- 3. Strategi Pengembangan Sarana Prasarana

4.2.1 Strategi Pengembangan Produk Wisata

Pengembangan produk wisata sangat memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan jumlah wisatawan, melestarikan lingkungan, juga memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat sekitar. Banyak dampak positif yang dapat dirasakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika produk wisata ini mampu dimaksimalkan maka akan membuka lapangan kerja di kalangan masyarakat seperti usaha kerajinan, usaha rumah makan, dan secara tidak langsung dapat menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar. Lebih lanjut jika dikelolah dengan baik akan menghasilkan Pendapatan asli Daerah untuk menunjang Anggaran pemerintah Daerah. Strategi pengembangan produk wisata Kabupaten Mamasa yaitu

Menata, mengembangkan dan mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai selling value (nilai jual) secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara.

a. Tujuan

Menata, mengembangkan dan mengoptimalkan produk wisata dilakukan dinas pariwisata sebagai langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata kabupaten Mamasa. Produk wisata inilah yang menjadi nilai jual untuk diperkenalkan ke wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Menurut Sekretariat Dinas Pariwisata:

"Tujuan menata dan pengembangan produk wisata yang kita lakukan tentu agar kita memiliki suatu karakter produk wisata yang memiliki nilai jual untuk kemudian dapat dipasarkan ke wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.". (Hasil Wawancara 19 Juli 2018)

b. Kebijakan

Dalam menata mengembangkan dan mengoptimalkan produk wisata kabupaten Mamasa, maka pemerintah memulai dengan penataan objek wisata prioritas yang dianggap memiliki potensial untuk dikembangkan dan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung.

Arvin Ital Putera, S.Sos selaku Kepala Bidang Promosi dan kesenian menjelaskan bahwa :

"Untuk menghasilkan suatu kawasan objek wisata yang mempunyai nilai jual maka perlu kita mengambil langkah-langkah yang tepat seperti penataan prioritas pengembangan objek wisata, pengembangan objek wisata sampai pada tahap pengotimalan objek wisata saat ini objek wisata prioritas adalah Air Terjun Liawan".

(Hasil Wawancara 19 Juli 2018)

Air terjun Liawan adalah salahsatu objek wisata di kecamatan Sumarorong yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi suatu kawasan wisata.

c. Program

Program dinas pariwisata kabupaten Mamasa dalam menata dan mengembangkan produk wisata yaitu dengan melakukan inventarisasi dan evaluasi objek wisata yang tersebar di kabupaten Mamasa. Pemerintah daerah melakukan inventarisasi objek wisata secara menyeluruh dan dievaluasi dengan memberikan skor terhadap masingmasing objek untuk mengetahui objek yang potensial untuk dijadikan objek wisata prioritas.

Potensi daya tarik wisata alam yang tersebar di beberpa Kecamatan di Kabupaten Mamasa digambarkan secara singkat pada uraian di bawah ini.

1) Kecamatan Mamasa

Kecamatan Mamasa merupakan lokasi pusat pemerintahan Kabupaten Mamasa. Sebagai pusat pemerintahan kabupaten, kecamatan Mamasa memiliki gabungan karakteristik lingkungan antara lingkungan perkotaan dan pedesaan yang dikelilingi nuansa pegunungan yang asri dengan berbagai potensi wisata alam yang potensial untuk dikembangkan sebagaimana digambarkan pada patel 4.7.

Tabel 4.7 Skor evaluasi potensi daya tarik wisata Alam di Kecamatan Mamasa

No	Nama Daya Tarik Wisata		Skor Penilaian								
		Α	В	C	D	E	F	G	Н		
1	Air Terjun Mambulilling	6	5	6	4	5	3	4	4	4,6	
2	Pemandian Air Panas Kole	4	4	4	7	4	7	4	3	4,6	
3	Pemandian Air Panas Rante Katoan	4	3	6	7	4	6	4	5	4,9	
4	Pemandian Air Panas Nusantara	4	3	6	7	4	7	4	6	5,1	
5	Sungai Mamasa	4	3	4	5	5	6	4	3	4,3	
Rata	- rata	4,4	3,6	5,2	6	4,4	5,8	4	4,2	4,7	

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas. 1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja; 5=agak baik; 6=baik; 7=sangat baik.

Sumber: Data sekunder Kabupaten Mamasa setelah diolah, 2018

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa kecamatan Mamasa memiliki 6 objek wisata potensial untuk dikembangkan dengan kondisi nilai 4,7 atau agak baik. Dari sejumlah objek wisata tersebut belum ada objek wisata yang dikelolah oleh pemerintah sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Warga desa Taupe Riana Mewa' yang dekat dengan air terjun Mambulilling mengungkapkan bahwa:

"Air terjun Mambulilling ini sangat bagus kalau dikelolah oleh pemerintah karena bisa dibuat tangga seribu untuk sampai kesana, selain itu bisa juga kita nikmati panorama alam yang masih sejuk dan bisa melihat keindahan kota ketika sampai dipuncak gunung."

(Hasil Wawancara 19 Juli 2018)

Gunung Mambulilling merupakan gunung tertinggi kedua di kabupaten Mamasa setelah gunung Gandang Dewata. Objek wisata ini sangat potensial untuk dikembangkan mengingat posisinya berada di kecamatan Mamasa sebagai pusat kegiatan pemerintahan.

2) Kecamatan Tawalian

Kecamatan Tawalian merupakan daerah penyangga sekaligus menjadi wilayah perluasan pengembangan Ibukota Kabupaten Mamasa.

Objek wisata alam kecamatan Tawalian digambarkan pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8 Skor evaluasi potensi daya tarik wisata Alam di Kecamatan Tawalian

N o.	Nama Daya Tarik Wisata		Skor Penilaian							Rata- rata
		Α	В	C	D	E	F	G	Н	
1	Air Terjun Parak	6	5	6	4	4	5	4	4	4,8
2	Mata Air Panas Rantekamiri	4	3	4	6	4	5	5	3	4,3
	Rata- rata 5,0 3,5 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 3,5					5,5				

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas. 1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja; 5=agak baik; 6=baiK, 7=sangat baik.

Letak yang berdekatan dengan ibukota kabupaten membuat Kecamatan Tawalian memiliki posisi strategis dalam pengembangan pariwisata. Pada umumnya wisatawan yang berkunjung ke Kota Mamasa juga akan berkeliling ke Kecamatan Tawalian, baik dengan berjalan kaki (trekking) maupun menggunakan kendaraan untuk melihat potensi wisata yang dimilikinya. Objek wisata alam kecamatan Tawalian yang potensial untuk dikembangkan adalah air terjun Parak dan Mata air Panas di Ranekamiri dengan nilai rata –rata 5,5 atau agak baik. Kedua objek wisata ini sama sekali belum mendapat perhatian dari pemerintah.

3) Kecamatan Sesenapadang

Kecamatan Sesenapadang terdiri atas 10 desa, di kecamatan ini dapat dilihat persawahan yang begitu indah terhampar. Daya tarik wisata Kecamatan Sesenapadang digambarkan dalam tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9 Skor evaluasi potensi daya tarik wisata alam di Kecamatan Sesenapadang

N	Nama Daya Tarik Wisata		Skor Penilaian									
0.		A	В	C	D	E	F	G	Н	rata		
1	Air Terjun Minanga	4	3	5	5	5	4	4	5	4,4		
2	Panorama Alam Lisuan Ada'		4	6	6	6	5	4	4	5,0		
Rata-rata		4,5	3,5	5,5	5,5	5,5	4,5	3,5	4,5	4,7		

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas.

1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja;

5=agak baik; 6=baik; 7=sangat baik

Keindahan alam yang ditawarkan dengan nilai rata-rata 4,7 atau biasa saja membuat pemerintah belum menjadikan daerah ini sebagai suatu daerah tujuan wisata unggulan, namun tidak jarang wisatawan yang melakukan *trekking* dari Kota Mamasa menuju lokasi ini.

4) Kecamatan Balla

Kecamatan balla merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan ibukota kabupaten Mamasa dengan sejumlah daya tarik wisata alam sebagaimana digambarkan dalam tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10 Skor evaluasi potensi daya tarik wisata alam di Kecamatan Balla

N	Nama Daya Tarik		Skor Penilaian								
0	Wisata	A	В	C	D	E	F	G	Н	-rata	
1	1 Gua Maria Bukit Pena		6	6	4	4	7	6	5	5,4	
2	Bukit Buntu Mussa	5	5	7	6	5	4	4	5	5,1	
3	3 Air Terjun Tambuk Manuk		4	5	4	4	5	4	4	4,4	
4	4 Air Terjun Allo Dio		4	5	4	4	5	4	4	4,4	
5 Air Terjun Sareayo		5	4	4	4	4	5	4	4	4,3	
	Rata-rata			5,4	4,8	4,2	5,2	4,4	4,4	4,7	

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas.

1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja; 5=agak baik; 6=baik; 7=sangat baik.

Sumber: Data sekunder setelah diolah, 2018

Daya tarik wisata alam dengan pemandangan yang sangat indah dari Buntu Mussa, yakni sebuah bukit yang terletak tidak jauh dari

perkampungan tradisional Ballapeu yang memiliki fasilitas *camping ground*, 4 unit shelter dan 1 unit dapur di bagian puncaknya. Beberapa air terjun alam dapat dijumpai pada jarak tempuh yang dekat dari jalan utama antara lain Air Terjun Tambuk Manuk, Air Terjun Allo Dio dan Air Terjun Sareayo.

5) Kecamatan Sumarorong

Daya tarik wisata alam di Kecamatan Sumarorong terdiri dari 4 obyek wisata. Objek wisata tersebut salahsatunya adalah objek wisata unggulan kabupaten Mamasa. Tabel 4.11 menggambarkan daya tarik wisata yang ada di kecamatan Sumarorong.

Tabel 4.11 Skor evaluasi potensi daya tarik wisata di Kecamatan Sumarorong

N 0.	Nama Daya Tarik Wisata		Skor Penilaian							
		A	В	С	D	Е	F	G	Н	
1	Air Terjun Liawan	5	4	6	5	6	4	4	7	5,1
2	Air Terjun Laloeng	4	4	6	4	5	4	4	5	4,5
3	Air Terjun Bakkele'	3	4	4	5	5	7	4	5	4,6
4	Agrowisata Kopi dan Kakao	6	4	6	4	6	7	5	3	5,1
	Rata-rata	4,5	4	5,5	4,5	5,5	5,5	4,3	5,0	4,8

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas. 1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja; 5=agak baik; 6=baik; 7=sangat baik.

Air Terjun Liawan merupakan salah satu obyek wisata alam andalan yang telah dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamasa, di kecamatan Sumarorong juga terdapat beberapa air terjun seperti Air Terjun Laloeng dan Air Terjun Bakkele. Air Terjun Bakkele berada di tepi jalan akses menuju Nosu, sehingga sangat mudah dijangkau, dan apabila ditata melalui perencanaan yang tepat dapat menjadi obyek wisata singgah yang menarik. Sumarorong merupakan kecamatan yang berperan penting dalam simpul transportasi wisata di Kabupaten Mamasa karena di kecamatan ini terdapat sebuah bandar udara domestik.

6) Kecamatan Messawa

Kecamatan Messawa merupakan pintu gerbang Kabupaten Mamasa dari arah Kabupaten Polewali Mandar di selatan. Daya tarik wisata potensial dan sudah dikelolah oleh pemerintah daerah adalah permandian air panas Malimbong. Tabel berikut menunjukkan objek wisata yang ada di kecamatan Messawa.

Tabel 4.12 Skor evaluasi potensi daya tarik wisata alam di Kecamatan Messawa

No	Nama Daya Tarik Wisata			Rata-						
110		A	В	C	D	E	F	G	Н	rata
6	Pemandian Air Panas Malimbong	4	5	6	6	4	6	4	5	5,0
	Rata-rata	4	5	6	6	4	6	4	5	5,0

Keterangan:

A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas.

1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja; 5=agak baik; 6=baik; 7=sangat baik.

Pemandian Air Panas Malimbong merupakan obyek wisata pemandian alami yang banyak dikunjungi wisatawan, tidak hanya dari Kabupaten Mamasa melainkan juga dari Kabupaten Polewali Mandar yang umumnya datang berakhir pekan secara berombongan.

7) Kecamatan Bambang

Kecamatan Bambang yang berada pada ketinggian 950-1.475 mdpl, terdiri dari 20 desa. Luas Kecamatan ini adalah 136,17 km2 (13.617 ha) atau 4,53% dari luas total kabupaten dengan 4.737,88 hektarnya berupa kawasan hutan. Objek wisata yang sedang dalam perencanaan pengembangan di kecamatan Bambang yaitu objek wisata Air Terjun Sambabo. Objek wisata ini merupakan salah satu objek wisata potensial yang ada di kabupaten Mamasa dan merupakan salah satu potensi wisata yang mampu menunjang wisatawan untuk berkunjung. Berikut hasil evalusi objek wisata potensial kecamatan Bambang.

Tabel 4.12 Skor evaluasi potensi daya tarik wisata di Kecamatan Bambang

No.	Nama Daya Tarik Wisata		Rata-							
		A	В	C	D	Е	F	G	Н	rata
1	Air Terjun Sambabo	7	7	7	5	5	4	5	5	5,6
Rata-rata		7	7	7	5	5	4	5	5	5,6

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas. 1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja; 5=agak baik; 6=baik; 7=sangat baik.

Hasil identifikasi tersebut menunjukkan bahwa potensi pengembangan pariwisata alam kabupaten Mamasa sangat layak untuk Pariwisata alam sangat potensial dikembangkan di dikembangkan. kabupaten Mamasa mengingat posisi geografisnya yang merupakan satusatunya daerah pegunungan di Sulawesi Barat dan sabagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Toraja yang dikenal sebagai destinasi Wisata internasional. Berbagai potensi seperti air terjun, permandian air panas, dan hamparan alamnya yang masih alami merupakan nilai jual yang sangat layak dipasarkan ke wisatawan domestic maupun mancanegara. Hal tersebut diungkapkan oleh kepala bidang pengembangan destinasi wisata Alfredi SE. M.Si:

"Wisata Alam sangat potensial untuk kita kembangkan di Kabupaten Mamasa, ada begitu banyak potensi wiasata yang kita miliki salah satunya adalah Air Terjun Liawan di Kecamatan Sumarorong yang memiliki nilai jual sesuai kebutuhan pasar wisatawan".

(Wawancara 19 Juli 2018)

Dari berbagai objek wisata yang tersebar di kabupaten Mamasa, pemerintah menetapkan beberapa objek wisata alam potensial prioritas diantaranya:

Obyek Pada Wilayah Pengembangan I:

- a) Taman Hutan Raya Mambulilling
- b) Pemandian Air Panas Kole

Obyek Pada Wilayah Pengembangan II:

- a) Air Terjun Liawan
- b) Pemandian Air Panas Malimbong

Obyek Pada Wilayah Pengembangan III

a) Air Terjun Sambabo

Obyek Pada Wilayah Pengembangan IV

a) Air Terjun Rimbe

Strategi pengembangan pariwisata kabupaten Mamasa dilakukan dengan penataan, pengembangan dan pengoptimalan produk wisata agar memiliki nilai jual yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut ditemukan bahwa produk wisata potensial yang layak dikembangkan di kabupaten Mamasa adalah objek wisata alam air terjun Liawan di Kecamatan Sumarorong. Produk wisata ini akan dimulai dengan menata kawasan wisata Air terjun Liawan di Kecamatan Sumarorong sebagai salah satu objek wisata potensial dengan nilai sangat baik untuk dikembangkan. Objek wisata inilah yang saat ini dimiliki kabupaten Mamasa sebagai produk wisata. Objek ini merupakan salah satu objek wisata yang diunggulkan dan diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa karena memiliki keunikan dan letaknya yang

strategis yaitu di Kecamatan Sumarorong yang posisinya berada di pertengahan jalan poros Polewali-Mamasa.

Penataan kawasan wisata secara bertahap merupakan bagian dari rangkaian kebijakan yang dilakukan dinas pariwisata kabupaten Mamasa. Penataan dimulai dengan mengembangkan kawasan wisata air terjun Liawan, dan setelah selesai akan dilanjutkan ke air terjun Sambabo di kecamatan Bambang. Dengan perencanaan yang baik maka akan menghasilkan suatu kawasan wisata yang baik pula sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Mamasa. Kebijakan yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata sudah berjalan sesuai dengan rencana.

4.2.2 Strategi pemasaran dan promosi pariwisata

 Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi serta kualitas promosi yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh semua hal tentang produk wisata yang ada dan siap jual;

a. Tujuan

Ketersediaan informasi yang memadai mempermudah wisatawan untuk mengetahui produk wisata yang ditawarkan oleh kabupaten Mamasa. Dengan mudahnya memperoleh informasi tersebut, maka wisatawan akan tertarik untuk berkunjung ke objek wisata yang ditawarkan.

b. Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Mamasa dalam hal ini dinas pariwisata kabupaten Mamasa dalam meningkatkan dan mengembangkan system informasi dilakukan dengan bekerjasama dengan swasata dan masyarakat yang diaanggap memiliki peran sangat sangat besar dalam mempromosikan pariwisata. Salah satu mitra dinas pariwisata yang bergerak di bidang promosi pariwisata adalah Ikatan Duta Pariwisata kabupaten Mamasa. Ikatan duta pariwisata Mamasa begerak di bidang promosi pariwisata. Selain itu membangun kerjasama dengan kelompok sanggar seni tari yang membantu pemerintah daerah dalam mempromosikan pariwisata di Mamasa lewat pentas seni baik dalam skala nasional maupun internasional.

c. Program

Program peningkatan dan pengembangan sistem informasi pariwisata dan kualitas promosi yang efektif dilakukan melaui beberapa program sebagai berikut :

Pertama, Ikut serta dalam event-event promosi kepariwisataan dan pameran kebudayaan skala regional, nasional, dan internasional. Event – event tersebut antara lain adalah Kemilau Sulawesi yang diadakan setiap tahunnya, Pameran pegalaran budaya di Taman Mini Indonesia Indah. Event-Event promosi wisata ini sudah sering dilakukan dinas pariwisata,

bekerjasama dengan sanggar seni yang ada di Mamasa. Promosi ini dilakukan untuk menarik wisatan berkunjung ke Mamasa.

Kedua, Menyelenggarakan kegiatan festifal budaya untuk mempromosikan kebudayaan dan kesenian yang ada di Kabupaten Mamasa, namun festival budaya tersebut belum dilakukan secara rutin.

Salahsatu ajang terbesar yang pernah diselenggarakan di kabupaten Mamasa adalah "Mambulilling Mountain Festival" dengan tema "Ayo ke Mamasa" adapun rangkain kegiatan sebagai berikut :

- Lomba Photografi (hunting) panorama gunung Mambulilling 26 Mei
 2016
- 2) Pendakian (hiking) ke gunung Mambulilling, 27 28 Mei 2016
- 3) Penanaman pohon sepanjang rute hiking, 27 Mei 2016
- 4) Pameran Photo hasil hunting, 9-11 Juni 2016
- 5) Lomba tari kreasi daerah, 25 Juli 2016
- 6) Lomba cipta lagu daerah Mamasa, 26 Juli 2016
- 7) Lomba fashion show motif tenun Mamasa, 27 Juli 2016
- 8) Malam apresiasi budaya, 28 Juli 2016
- Lomba musik bambu antar kecamatan se-Kabupaten Mamasa, 8-12 Agustus 2016
- 10) Karnaval budaya dengan kostum unik Mamasa, 13 Agustus 2016
- 11)Pemecahan rekor MURI Musik Pompang Peserta Terbanyak, yaitu 7.777 pesrta, 13 Agustus 2016

Kegiatan ini sukses menarik sejumlah wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik.

Ketiga, Menyelenggarakan ajang pemilihan "Muane masokan anna baine matatta". Ajang tersebut merupakan ajang pemilihan putra-putri terbaik daerah yang telah melalui tahap-tahap seleksi yang nantinya akan dinobatkan menjadi Duta Pariwisata Kabupaten Mamasa dan diharapkan dapat menguasai seluk beluk tentang kepariwisataan Mamasa dan membantu dalam memperkenalkan Kabupaten Mamasa di dalam maupun di luar daerah. Sama halnya dengan ajang-ajang pemilihan pada umumnya, Ajang ini dilaksanakan sekali dalam setahun waktu berjalan.

Ajang pemelihan ini dilaksanakan dengan bekerjasama Ikatan Duta Pariwisata Mamasa. Ikatan Duta Pariwisata Mamasa adalah salah satu Organisasi penggiat Pariwisata yang bergerak di bidang promosi pariwisata. Tujuan kita adalah ingin memperkenalkan pariwisata Mamasa baik di dalam maupun ke Luar Negeri. Adapun rangkaian kegiatan yang sudah sering dan bahkan rutin kita lakukan adalah Pemilihan Duta Pariwisata setiap tahunnya. Duta Pariwisata ini adalah orang yang akan memperkenalkan Pariwisata Mamasa Melalui Event-Event Pariwisata. Sekretaris Ikatan Duta Pariwisata Kabupaten Mamasa Brilyan Tiara, SE saat ditemui mengungkapkan bahwa:

"Panitia pemilihan Muane masokan dan Baine matatta' tahun 2018 sudah terbentuk dan sedang melakukan penjaringan kepada para pemuda-pemudi terbaik kabupaten Mamasa yang akan bersaing untuk menjadi Duta Pariwisata. Namun panitia yang kami bentuk tahun ini tidak mendapatkan anggaran dari pihak pemerintah sehingga kami tidak mampu bekerja secara maksimal."

(Wawancara 19 Juli 2018)

Keempat, Promosi melalui media massa dan sosial. Melakukan promosi kepariwisataan melalui media massa maupun media sosial dilakukan Pemerintah daerah lewat pembuatan website dinas pariwisata untuk memperkenalkan keadaan dan kondisi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Mamasa. Hanya saja website ini masih belum berjalan secara efektif dikarenakan masih banyak info yang belum terupdate dan setelah ditanyakan kepada dinas terkait, website tersebut memang sedang dalam proses perbaikan, sebagaimana di ungkapkan oleh staf dinas pariwisata bapak Karel bahwa

"Saat ini website dinas pariwisata belum di aktifkan kembali dan masih menunggu informasi dari kominfo kabupaten Mamasa. Memang informasi pariwisata yang termuat di website kami masih sangat minim dan boleh dikatakan tidak memadai karena informasi yang disajikan tidak pernah terupdate".

(Wawancara 19 Juli 2018)

Tidak adanya akses untuk memperolah informasi tentang kepariwisataan di Kabupaten Mamasa merupakan salah satu penghambat

untuk menarik wisatawan ke Kabupaten mamasa. Hal tersebut dapat dilihat dari website dinas Pariwisata Mamasa yang tidak pernah mengupdate kegiatan pariwisata di Kabupaten Mamasa, bahkan hampir segala informasi tentang pariwisata di Kabupaten Mamasa tidak termuat di website tersebut. Saat peneliti hendak memperoleh informasi websaite tersebut sudah tidak dapat di akses.

Kelima, Pemerintah Daerah juga membuat dan menjual CD-CD lagu daerah Mamasa yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi daerah. Dengan video klip yang mengangkat panorama-panorama serta objekobjek wisata yang ada di Mamasa sebagai alat promosi daerah sekaligus peletarian kebudayaan dan kesenian.

Kegiatan promosi dan pemasaran tersebut dilakukan dengan melibatkan beberapa penggiat pariwisata seperti Sanggar Seni, Duta Pariwisata dan Masyarakat penggiat pariwisata.

II. Meningkatkan "sadar wisata" dan sapta pesona di kalangan para pejabat, pengusaha dan masyarakat, agar tumbuh kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan dan kearifan lokal;

a. Tujuan

Upaya peningkatan sadar wisata dan sapta pesona lewat sosialisasi kepada pemeritah, swasta maupun masyarakat penggiat pariwisata agar semua elemen ini bahu membahu dalam menjaga objek wisata yang ada

b. Kebijakan

Pemerintah mengajak ikatan duta pariwisata sebagai mitra dalam menjaga dan memperhatikan lingkungan pariwisata

c. Program

Program yang dilakukan dinas pariwisata saat ini adalah melakukan pemasangan sapta pesona di beberapa objek wisata seperti desa balla dan di kecamatan Sumarorong.

4.2.3 Strategi pengembangan sarana prasarana Perencanaan kebutuhan prasarana pariwisata yang meliputi : jalan, jembatan, air bersih, listrik, telepon dan toilet umum,peta objek wisata, alat ukur (GPS,Kompas dll) disesuaikan dengan arah perkembangan objek dan daya tarik wisata;

a. Tujuan

Pemerintah daerah membangun sejumlah prasarana untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan. Tersedianya prasarana yang memadai akan menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan bertahan dalam waktu yang lama di kabupaten Mamasa. Lamanya kunjungan wisatawan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar wisata maupun terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Mamasa.

b. Kebijakan

Kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan prasarana diprioritaskan pada air terjun Liawan di Kecamatan Sumarorong. Air terjun Liawan ini terletak di kawasan hutan yang posisinya tidak terlalu jauh dari pusat Kecamatan Sumarorong, dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua, maupun roda empat. Setelah pembangunan prasarana selesai maka akan dilanjutkan ke objek air terjun Sambabo di kecamatan Bambang. Kepala dinas pariwisata mengungkapkan bahwa:

"Setelah pembangunan prasarana di air terjun liawan slesai maka akan kita usahakan mencari anggaran lagi untuk pengembangan air terjun Sambabao di kecamatan Bambang. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 300 meter sehingga sangat potensial untuk dikembangkan"

(Wawancara 19 Juli 2018)

Kebijakan arah pembangunan pariwisata secara bertahap merupakan upaya pemerintah dalam mengembangkan objek wisata ditengan kondisi dana yang sangat minim. Oleh karena itu pengembangan objek wisata dengan membangun kawasan wisata secara bertahap dan terarah diharapkan memberikan kontribusi yang baik terhadap peningkatan wisatawan baik domestic maupun mancanegara.

c. Program

Program pembangunan prasarana yang dilakukan pemerintah difokuskan pada objek wisata air terjun Liawan di Kecamatan Sumarorong. Pembangunan prasarana dii objek wisata air terjun Liawan berupa penginapan 5 kamar model banua mamasa modern, 3 kamar model rumah modern, kamar ganti / WC umum untuk pria dan wanita berjumlah masing-masing 2 kamar, kolam ikan, kantin, gazebo-gazebo atau pondok-pondok wisata, dan Baruga (tempat pertemuan/rapat) bernuansa alam. Semua fasilitas yang sedang dibangun ini adalah milik pemerintah yang akan dikelolah oleh dinas pariwisata bekerjasama dengan masyarakat di sekitar objek wisata. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Alfredi, SE, M.Si menjelaskan bahwa:

"Kita sedang dalam tahap pengembangan objek Wisata Air Terjun Liawan yaitu dengan membangun beberpa prasarana yang mampu memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Dengan adanya fasilitas ini harapan kita adalah pembangunan ini dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata ini "

(Wawancara 19 Juli 2018)

Senada dengan yang di ucapkan oleh salah satu Wisatawan Mety

Diansari yang mengungkapkan bahwa "

"Saat ini fasilitas yang disiapkan sudah semakin baik. Selain itu akses jalan dari Ibukota Kecamatan sumarorong sudah baik. Fasilitas-fasilitas yang sedang dibangun ini akan memberikan kenyamanan bagi pengunjung "

(Wawancara 19 Juli 2018)

Namun lai halnya dengan yang diungkapkan oleh Yohanis sebagai salahsatu penggiat Pariwisata bahwa yang menghambat kurangnya wisatawan yang berkunjung ke Mamasa karena kurangnya keseriusan pemerintah dalam mengembangkan produk wisata yang ada

"Pemerintah tidak serius menata pariwisata di Kabupaten Mamasa, banyak objek wisata yang mempunyai nilai jual yang bisa dikembangkan namun belum dikelolah dengan baik misalnya air terjun malute di lombonan, air terjun Mambulilling di Desa Mambulilling kecamatan Mamasa dan masih banyak lagi tapi pemerintah solah-olah hanya diam."

(Wawancara 19 Juli 2018)

Senada dengan itu, Dominggus salahsatu warga yang berdomisili tidak jauh dari objek wisata air terjun Malute

Dalam satu minggu pasti ada terus orang datang berkunjung, biasa foto-foto saja ada juga yang dating mandi. Cuma kuliat tidak ada perhatian pemerintah. Lamami ini objek wisata ditau tapi tidak ada perhatian pemerintah, jalan saja kamiji masyarakat yang bersihkan jalan kesana. Seandainya tidak selalu dibersihkan pasti tidak bisa miki lewat karena banyak rumputnya.

(Wawancara 19 Juli 2018)

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa, beliau mengungkapkan bahwa air terjun Malute merupakan salahsatu air terjun di kecamatan mamasa yang sedang ramai diperbincangkan oleh para penggiat pariwisata khususnya wisatawan lokal, setiap akhir pekan selalu ada masyarakat yang berkunjung ke objek wisata ini.

"Air Terjun Malute adalah salahsatu potensi yang bisa kita tata untuk menjadi produk wisata yang layak kita jual. Namun saat ini karena keterbatasan anggaran sehingga focus kita adalah pengembangan air terjun di Kecamatan Sumarorong yaitu Air terjun Liawan".

(Wawancara 20 Juli 2018)

Objek wisata Air Terjun Liawan merupakan objek wisata unggulan pemerintah Ikabupaten Mamasa saat ini. Objek wisata ini tepatnya di desa Tadisi Kecamatan Sumarorong yang tidak jauh dari kota kecamatan Sumarorong. Objek wisata ini sudah dikelolah oleh pemerintah daerahdan sedang dalam tahap pengembangan, meskipun belum secara signifikan memberikan kontribusi terhadap PAD. Kepala Bidang Promosi dan Kesenian Arvin.I. Putera, S.sos mengungkapkan:

"Respon Pemerintah daerah cukup baik dalam mendorong pengembangan destinasi pariwisata di Mamasa, terbukti dengan mengucurkan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata"

(Wawancara 19 Juli 2018)

Keterbasan anggaran tidak mengurangi antusial dinas pariwisata untuk terus berkreasi mencari cara agar tujan menjadikan mamasa sebagai destinasi pariwisata nasional dapat tercapai. Dengan tercapainya Mamasa sebagai destinasi pariwisata nasional, maka akan menjadi dasar kebijakan pendanaan pengembangan pariwisata dari pemerintah pusat. Dengan rangkain program tersebut sangat diharapkan partisipasi dari semua steakholder agar mampu bekerjasama dalam mewujudkan Kabupaten Mamasa sebagai destinasi Pariwisata Sulawesi Barat.

Dengan adanya anggaran yang didapatkan oleh pemerintah melalui perjuangan Dinas pariwisata dari pemerintah pusat menjadikan objek wisata ini bisa dikembangkan. Karena itu sangat diharapkan kerjasama dari semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak agar pengembangan objek wisata unggulan Kabupaten Mamasa ini bisa tertata dengan baik. Secara signifikan objek wisata ini belum menunjang pendapatan asli daerah, namun sangat diharapkan ketika pembangunan ini selesai maka akan mampu memberikan dampak terhadap pemerintah maupun kepada masyarakat di sekitar objek wisata.

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Mamasa dari tahun 2011-2015 tidak mengalami peningkatan yang signifikan bahkan cenderung mengalami pasang-surut (fluktuasi) sedangkan yang telah ditetapkan menjadi

destinasi Pariwisata Unggulan di Provinsi Sulawesi Barat adalah Kabupaten Mamasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 4.13.

Tabel 4.13 Jumlah kunjungan wistawan Kabupaten Mamasa
Tahun 2011-2015

Wisatawan							
	2011 2012 2013 2014 2015						
Mancanegara	190	-	-	38	23	251	
Domestik	6881	7934	8138	2773	5786	31512	
Jumlah	7071	7934	8138	2811	5809	31763	

Sumber:BPS Kabupaten Mamasa 2016

Data tersebut menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan didominasi oleh wisatawan domestik sedangkan wisatawan mancanegara masih sangat minim. Jumlah kunjungan wisatawan sangat ditentukan oleh produk wisata yang ditawarkan sehingga sangat diharapkan perhatian serius pemerintah dalam menata dan mengembangkan objek wisata.

Analisis strategi pengembangan pariwisata kabupaten mamasa dapat dilihat pada Matriks 4.1 berikut.

Tabel Matriks 4.14 Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Mamasa

	Strategi Pengembangan		Dimensi Strategi		
No	Pariwisata Kabupaten Mamasa	Tujuan	Kebijakan I	Program	
1	Strategi Pengembangan Produk Wisata	Tersedianya Produk Wisata yang memiliki nilai jual sesuai kebutuhan pasarWisatawan	prioritas yang dianggap wis potensial untuk dikembangkan dan dapat Pen menarik wisatawan untuk Obj	Pengembangan pro wisata yang dilaku tidak mengacu kep hasil evaluasi objek sehingga produk w yang ditawarkan ti sesuai dengan kebu pasar wisatawan	kan ada wisata risata dak
2	Strategi Pemasaran dan Promosi	Untuk memperkenalka n pariwisata kepada pihak luar. Untuk meningkatkan pemasaran	mengembangkan sistem informasi serta kualitas promosi yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh semua hal tentang produk wisata yang ada dan siap jual 2. Meningkatkan "sadar wisata" dan sapta pesona di kalangan para pejabat, 4. Sos	nbuatan Strategi pemasaran promosi yang dilak sur tidak efektif karena memaksimalkan wangikuti dinas pariwisata. Selain itu objek wisawesi Strategi pemasaran promosi yang dipasarkan le	kukan a tidak ebsite sata bih aya a arah bangan

			yang berwawasan lingkungan dan kearifan lokal;		
3	Strategi pengembangan sarana dan Prasarana	Terbangunnya sebuah kawasan Wisata dalam satu kesatuan yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan Wisatawan	Perencanaan kebutuhan prasarana pariwisata yang meliputi : jalan, jembatan, air bersih, listrik, telepon dan toilet umum,peta objek wisata, alat ukur (GPS,Kompas dll) disesuaikan dengan arah perkembangan objek dan daya tarik wisata; Pemenuhan kebutuhan prasarana pariwisata secara bertahap diusahakan pada objek-objek dan daya tarik wisata unggulan atau yang sudah berkembang yang seterusnya menyebar ke setiap objek dan daya tarik wisata lainnya	panas rante- rante	Strategi pengembangan sarana dan prasarana objek wisata tidak difokuskan pada salah satu objek wisata sehingga tidak terbangun sebuah kawasan wisata dalam satu kesatuan.

Sumber : Data primer 2018

4.3 Faktor Penghambat Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Mamasa

Strategi pengembangan pariwisata merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan secara terpadu dan terencana dengan baik serta melibatkan berbagai aspek sehingga sehingga dalam implementasinya tidak akan terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor penghambat strategi pengembangan pariwisata kabupaten Mamasa sebagai berikut :

4.3.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menunjang kinerja dinas pariwisata, sumberdaya organisasi yang dimiliki merupakan kunci tercapainya setiap program yang telah direncanakan. Kurangnya kualitas sumberdaya yang dimiliki merupakan salahsatu penghambat dalam upaya mencapai tujuan sebagai Destinasi pariwisata Sulawesi Barat. Berhasilnya suatu pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mamasa juga tergantung pada kemampuan para pelaksana yang bertugas pada tempat-tempat daerah tujuan wisata maupun aparat pelaksana pengembangan sektor pariwisata, yakni aparat Dinas Pariwisata kabupaten Mamasa itu sendiri yang memiliki kewenangan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata.

Dinas Pariwisata kurang didukung oleh tersedianya aparatur di bidang kepariwisataan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kondisi Aparatur Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa sebanyak 37 Orang Pegawai PNS dan, selain itu ada juga Pegawai Tenaga Sukarela sebanyak 22 Orang, namun hanya ada 2 pegawai yang memiliki kualifikasi di bidang pariwisata.

4.3.2 Anggaran

Anggaran merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam wilayah proses pembangunan suatu termasuk pembangunan Kepariwisataan. Seialan dengan sangat signifikannya pengaruh ketersediaan dana dalam pembiayaan berbagai rencana pembangunan yang telah direncanakan, maka strategi pendanaan adalah merupakan salah satu variabel terpenting yang harus difikirkan dalam proses perencanaan. Menyadari berbagai keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dan masyarakat lokal dalam pendanaan berbagai rencana pembangunan yang ada selama ini, maka strategi pendanaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Mamasa perlu dilakukan secara sistematis dan integratif serta proaktif dan agresif.

Selain itu anggaran dari pemerintah masih minim sehingga pengembangan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Anggaran yang digunakan dalam mengembangkan pariwisata bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat, namun tidak cukup untuk menunjang pembangunan pariwisata karena untuk mendapatkan anggaran yang cukup, syaratnya harus dijadikan sebagai

salahsatu Destinasi Pariwisata Nasional atau Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional. Kebijakan tersebut membatasi pemerintah untuk menata pariwisata di kabupaten Mamasa dengan baik sesuai dengan Rencana strategis yang telah disusun

Dalam wawancara dengan Ibu Agustina Toding, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Dinas Pariwisata menjelaskan :

"Angaran yang dikelolah oleh Dinas Pariwisata dikatakan cukup tidak juga namun kita bersyukur karena berkat kerja keras, kami boleh mendapatkan Dana Alokasi Khusus dari Kementrian Pariwisata yang kita gunakan untuk pengembangan Destinasi Wisata Pada Objek wisata Air terjun Liawan di Kecamatan Sumarorong dan saat ini dalam tahap pengerjaan"

(Wawancara 19 Juli 2018)

Keterbasan anggaran tidak mengurangi antusial dinas pariwisata untuk terus berkreasi mencari cara agar tujan menjadikan mamasa sebagai destinasi pariwisata nasional dapat tercapai. Dengan tercapainya Mamasa sebagai destinasi pariwisata nasional, maka akan menjadi dasar kebijakan pendanaan pengembangan pariwisata dari pemerintah pusat. Dengan rangkain program tersebut sangat diharapkan partisipasi dari semua steakholder agar mampu bekerjasama dalam mewujudkan Kabupaten Mamasa sebagai destinasi Pariwisata Sulawesi Barat.

Tabel Matriks 4.14 Faktor Penghambat Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Mamasa

No	Strategi pengembangan Pariwisata Kabupaten Mamasa	Faktor Penghambat		
		Sumber Daya Manusia	Anggaran	
1	Strategi Pengembangan Produk Wisata	Tidak konsisten dalam menata produk wisata berdasarkan hasil evaluasi objek wisata potensial.	Pemerintah pusat tidak dapat mengalokasikan anggaran, karena idak tercantumnya Kabupaten Mamasa sebagai Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional maupun Destinasi pariwisata Nasional.	
2	Strategi Pemasaran dan Promosi	Pemasaran dan promosi yang dilakukan tidak sesuai dengan arah pembangunan pariwisata kabupaten Mamasa. Selain itu media promosi yang dilakukan tidak maksimal karena hanya mengandalkan event-event kepariwisataan yang melibatkan mitra pariwisata seperti duta pariwisata dan sanggar seni	Untuk ikut event pariwisata harus melibatkan jumlah peserta yang besar sehingga biaya yang digunakan juga besar sementara anggaran untuk dinas pariwisata sangat minim	
3	Strategi pengembangan sarana dan Prasarana	Sarana prasarana yang disiapkan harus sesuai dengan kebutuhan wisatawan sehingga dibutuhkan sumberdaya manusia yang memahami tentang kepariwisataan	Lemahnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki menghambat implementasi program karena pembangunan tidak terarah dan menghabiskan anggaran.	

Sumber : Data Primer setelah diolah, 2018

BAB V

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan ini maka dapat disimpulkan :

- 1. Dengan mengacu kepada dimensi-dimensi strategi yakni: Tujuan, Kebijakan dan Program , maka strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa termasuk ke dalam Strategi Sebagai Rencana. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai perencanaan organisasi yang disusun secara matang dan segala Tujuan, Kebijakan dan Program yang dilakukan Dinas Pariwisata yang dikembangkan secara sadar dan sengaja, dan dalam pelaksanaanya belum berjalan Strategi pengembangan produk wisata belum maksimal karena tidak konsinten pemerintah dalam membangun sebuah kawasan objek wisata sesuai dengan hasil evaluasi objek wisata potensial, strategi promosi dan pemasaran tidak efektif karena terfokus pada event-event pariwisata yang membutuhkan anggaran yang besar, dan strategi pengembangan sarana dan prasarana belum berjalan dengan maksimal karena minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.
- Adapun faktor yang menghambat strategi pengembangan pariwisata kabupaten Mamasa yaitu sumber daya manusia yang belum memadai, dan anggaran yang tersedia belum mencukupi.

6.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pengembangan obyek wisata, maka adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah memfokuskan pengembangan kawasan wisata Air Terjun Liawan dengan memanfaatkan ruang yang tersedia sehingga terbangun satu kawasan wisata yang komplit untuk menarik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara agar dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Antariksa,basuki.(2011). Peluang dan tantangan Pengembangangan Kepariwisataan Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Asryandi, Ian. 2016. Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Bissapu di Kabupaten Bantaeng. Skipsi. Makassar : Fisip Unhas.
- BPS Kabupaten Mamasa. 2016. *Kabupaten Mamasa dalam Angka 2016*. Mamasa: BPS Kabupaten Mamasa.
- Hunger, David J dan Wheelen Thomas L. 2003. *Manajemen Strategis*, Yogyakarta: ANDI.
- Itamar, Hugo. 2017. Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tanah Toraja. Skripsi. Makassar: Fisip Unhas.
- Maesturi, Beatrix. 2017. Pola Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam Perwujudan Mamasa sebagai Destinasi Pariwisata Sulawesi Barat. Skripsi. Makassar : Fisip Unhas.
- Mintzberg, Henry, Lampel, Joseph, Quinn, James Brain, dan Sumantra Ghoshal. 2003. *The Strategy Process*, New Jersey: Pearson Education.
- Nyoman.S. Pendit. 2002. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Pitana, I Gde dan Diarta, I Ketut Surya, 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Sedarmayanti. 2012. Good Governance Kepemerintahan yang Baik Bagian Kedua Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju

- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wahab, Salah. 1992. *Manajemen Kepariwisataan*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.

Voeti Oka A 1990 Pengantar Ilmu Pariwisata Angkasa Bandung

Tooli, Ola 7, 1000. Foriganiai mina Fariwoala. Filigilada. Baridang.	
, 1996. Pemasaran Pariwisata. Angkasa. Bandung.	
, 1997. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. P	т.
Pradnya Paramita. Jakarta.	

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

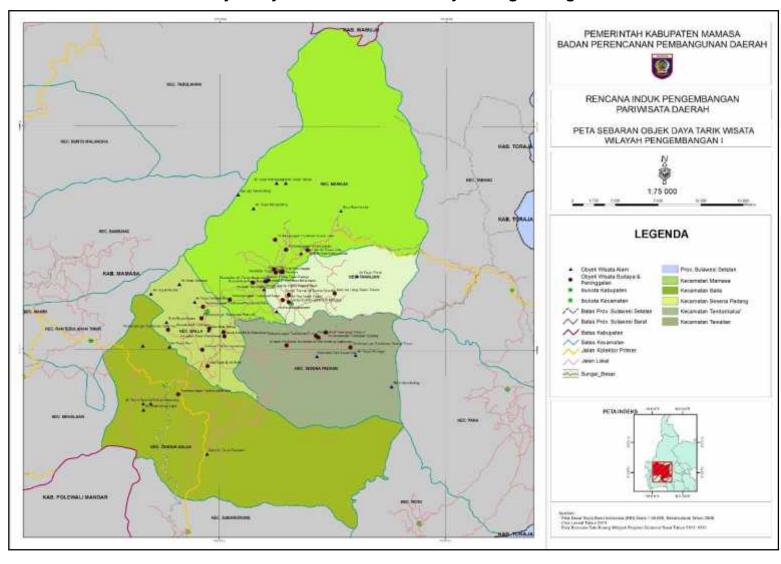
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Keparawisataan.

- Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Kabupaten Mamasa sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Mamasa

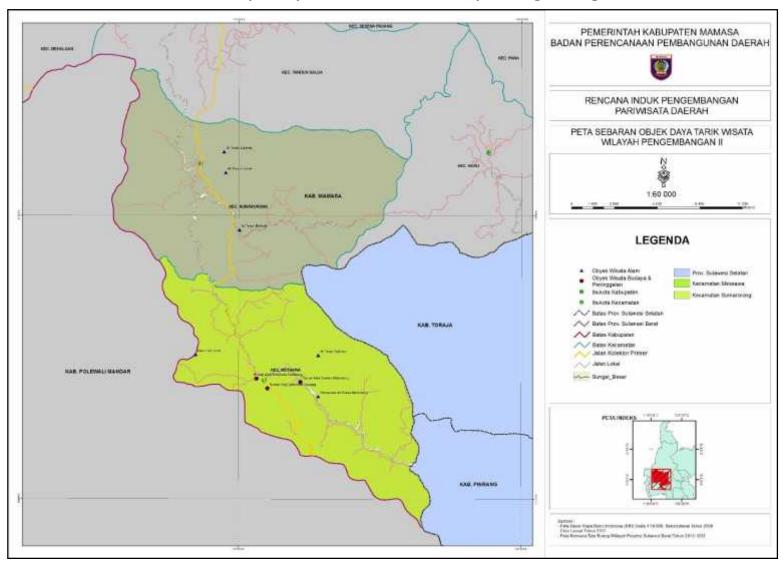
STRUKTUR ORGANISASI KEPALA DINAS AGUSTHINA TODING, S. Pd, M. Pd SEKRETARIS DINAS CYNTHIA JABATAN FUNGSIONAL KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN KASUBAG.KEUANGAN, PROGRAM PELAPORAN & PPK **DEMMALURU** SAMUEL PAOTONAN **KABID KABID KABID** PROMOSI DAN KESENIAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA **INVESTASI PARIWISATA** ARVIN.I.PUTRA S.Sos ALFREDI, SE.MSi KASI. KASI. KASI. PROMOSI DAN PEMASARAN KASI. EVALUASI & PENGAWASAN SARANA WISATA INVESTASI & BINA MITRA IBRAHIM, S. Pd, MM JENNY VERSARI, SS M. TASBIH HADI KASI. PENGEMBANGAN KESENIAN DAN FILM KASI. KASI. PEMANFAATAN SARANA WISATA INDUSTRI PARIWISATA MEITRY A. PUALILLIN, YANESTI MANGALIK, A. Md S. Kom HERMIN,ST KASI. INFORMASI PARIWISATA KASL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KASI. **EVALUASI & PENGAWASAN RESKI ANITA SITO** BERSA M SALAMANGI, S.Sos ROY MARTHEN S.Pd.

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa

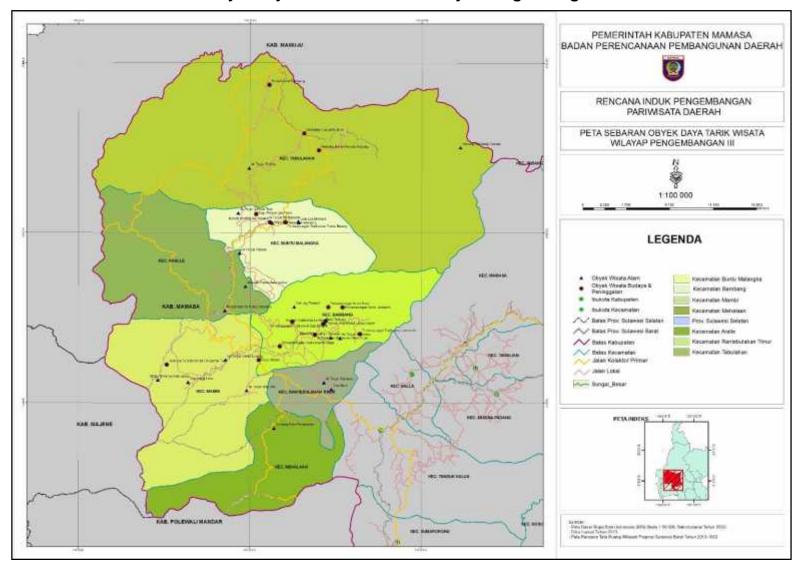
Sebaran Obyek Daya Tarik Wisata Pada Wilayah Pengembangan I



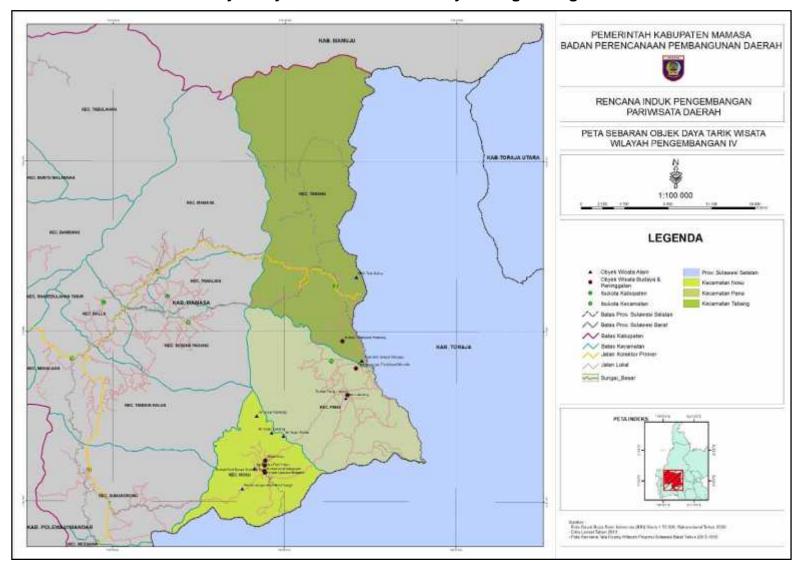
. Sebaran Obyek Daya Tarik Wisata Pada Wilayah Pengembangan II



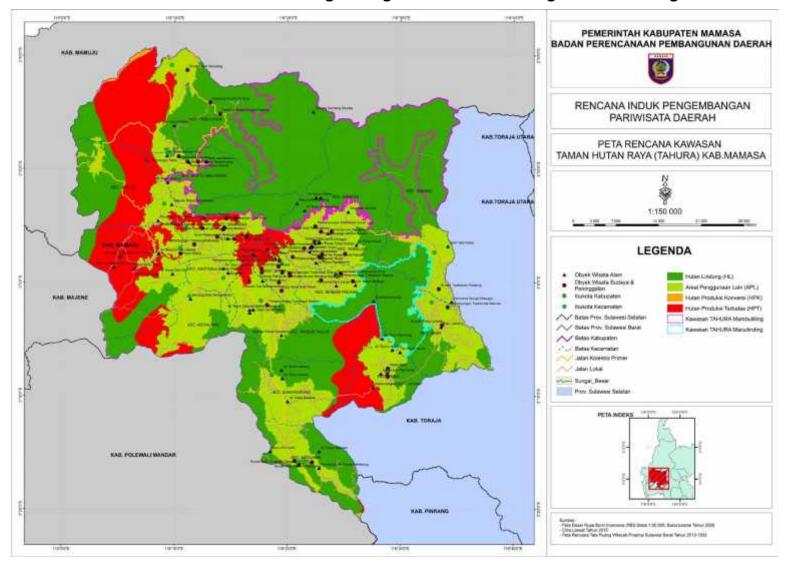
Sebaran Obyek Daya Tarik Wisata Pada Wilayah Pengembangan III



Sebaran Obyek Daya Tarik Wisata Pada Wilayah Pengembangan IV



Rencana Kawasan Pengembangan Tahura Mambulilling dan Marudinding





PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGANKEPARIWISATAAN KABUPATEN MAMASA TAHUN 2017-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa pengembangan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah sehingga dilakukan sistematis, secara terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya dan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu menetapkan Rencana Pengembangan Kepariwisataan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Mamasa;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

23

Tahun

2014

tentang

Nomor

7. Undang-Undang

Indonesia Nomor 5679);

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 12. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kepariwisataan 012/KP/IV/2001 tentang Pemberian Perizinan Usaha Kepariwisataan;
- 13. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan kabupaten Mamasa Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025;

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Mamasa tahun 2015-2035;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

Dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGANKEPARIWISATAAN

KABUPATEN MAMASA TAHUN 2017-2025;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- 4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

- 5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RIPPAR-PROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan provinsi untuk periode 15-25 tahun.
- 6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan RIPPAR-KAB/KOTA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota untuk periode 15-25 tahun.
- 7. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 8. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- 9. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
- 10. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
 - 11.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
- 11. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
- 12. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
- 13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.

BAB II AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Asas RIPPARDA meliputi:

- 1. Manfaat pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai Obyek Daya Tarik Wisata serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
- 2. Keterpaduan yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
- 3. Berkelanjutan yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
- 4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah;

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penetapan RIPPARDA adalah:

- 1. Memberikaan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi pariwisata daerah yang meliputi obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata dan usaha jasa pariwisata;
- 2. Memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan didaerah yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan aktual secara terintegrasi dan sinergis sehingga pariwisata dijadikan alat dalam mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan;

- 3. Menyikapi peluang pembangunan kepariwisataan didaerah sejalan dengan perkembangan Pemerintah Daerah; dan
- 4. Memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang didasari oleh kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran RIPPARDA adalah:

- 1. Tersusunnya suatu konsep pengembangan kepariwisataan daerah, yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan pariwisata Mamasa;
- 2. Teridentifikasinya kawasan wisata unggulan daerah dan obyek wisata unggulan daerah sesuai kriteria yang ditetapkan; dan
- 3. Tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan daerah.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Fungsi RIPPARDA adalah:

- 1. Sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, prasarana dan sarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
- 2. Sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
- 3. Sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata; dan
- 4. Sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa.

BAB III RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup RIPPARDA terdiri atas:
 - a. Ruang lingkup wilayah;
 - b. Ruang lingkup pekerjaan; dan
 - c. Ruang lingkup substansi.
- (2) Ruang lingkup wilayah RIPPARDA adalah daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah darat dan laut;
- (3) Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memfokuskan pada perencanaan satu atau beberapa obyek wisata yang menjadi atau akan menjadi unggulan daerah;
- (4) Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :
 - a. kebijaksanaan makro dan mikro pariwisata daerah;
 - b. objek dan daya tarik wisata (ODTW);
 - c. prasarana dan sarana pendukung wisata;
 - d. karakteristik pasar wisatawan;
 - e. kawasan wisata unggulan dan prioritas pengembangan wisata; dan
 - f. kebijaksanaan, strategi dan program pengembangan kepariwisataan.

Jangka Waktu

Pasal 7

Jangka waktu RIPPARDA adalah 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 8

Kebijakan sektor pariwisata daerah, meliputi:

- 1. Peningkatan mutu prasarana dan sarana serta pelayanan jasa pariwisata dan jasa penunjang dengan tetap memelihara kebudayaan daerah;
- 2. Pembinaan pelestarian peninggalan sejarah dan promosi obyek-obyek pariwisata yang dilakukan sesuai dengan perkembangan kepariwisataan; dan
- 3. Kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk penggalian obyek wisata baru.

Pasal 9

Sasaran pengembangan pariwisata daerah, adalah:

- 1. Terkelolanya seluruh potensi pariwisata secara lebih profesional dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan industri kepariwisataan yang sejalan dengan kepentingan penataan ruang, peningkatan pendapatan asli daerah, pengembangan seni dan budaya daerah serta pelestarian lingkungan;
- 2. Menjadikan Kabupaten Mamasa masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN).
- 3. MempertahankanKabupaten Mamasasebagai primadona dan Destinasi Wisata Unggulan di Provinsi Sulawesi Barat;
- 4. Memperluas kesempatan berusaha, lapangan kerja dan mendorong industri lokal dalam peningkatan kerajinan khas Mamasa berbasis penggunaan bahan baku lokal;
- 5. Menjadikankegiatan / iven pariwisata sebagaisimpul kegiatan masyarakat dan pemerintah; dan
- 6. Menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya yang dilandasi nilai-nilai agama.

Pasal 10

Strategi kebijakan dalam pengembangan pariwisata,

adalah:

- 1. Pengembangan dan penataan obyek serta daya tarik wisata dan menggali obyek dan daya tarik wisata baru;
- 2. Membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kepariwisataan;
- 3. Meningkatkan promosi kepariwisataan untuk mempertahankanKabupaten Mamasa tetap sebagai primadona danDestinasi Unggulan di Sulawesi Barat;
- 4. Meningkatkanpendidikan dan latihan kepariwisataan untuk meningkatkan kemapuan dan keterampilan bagi tenaga usaha pariwisata dan aparat terkait;
- 5. Menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah serta memelihara dan melestarikan benda-benda purbakala sebagai peninggalan sejarah dan aset daerah;
- 6. Meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan daerah dan masyarakat;
- 7. Melestarikan dan menertibkan sarana transportasi berciri khas daerah yang berdimensi wisata.

BAB V OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA DI DAERAH

Pasal 11

Obyek dan Daya Tarik Wisata di Daerah meliputi :

- 1. Wisata alam;
- 2. Wisatasejarah, budaya dan Peninggalan Budaya;
- 3. Wisataminat khusus; dan
- 4. Event/kegiatan kepariwisataan.

Pasal 12

Rincian selengkapnya Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam naskah RIPPARDA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Selain Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati dapat menetapkan suatu kawasan dan atau kegiatan sebagai Obyek dan Daya Tarik Wisata serta kegiatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Mamasa berdasarkan perkembangan potensi pariwisata daerah dan dapat termuat di dalam suatu data base pariwisata.

BAB VI STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 14

StrategiPengembangan Pariwisata, meliputi:

- 1. Strategi pengembangan produk wisata;
- 2. Strategipemasaran dan promosi;
- 3. Strategipengembangan aksesibilitas;
- 4. Strategipengembangan sarana prasarana; dan
- 5. Strategipengembangan usaha.

Pasal 15

StrategiPengembangan Produk Wisata, meliputi:

- 1. Menata, mengembangkan dan mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai selling value (nilai jual) secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara;
- 2. Menataevent-event pariwisata secara teratur untuk ditingkatkan menjadi event regional, nasional dan internasional;

- 3. Usaha penganekaragaman produk/daya tarik wisata;
- 4. Menata dan mengembangkan produk wisata yang berwawasan lingkungan;
- 5. Menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap obyek wisata mempunyai ciri khas sendiri; dan
- 6. Menggabungkan obyek wisata menjadi satu kesatuan kawasan dan menyatukan kawasan menjadi satu kesatuan daerah tujuan.

Pasal 16

Strategi pemasaran dan promosi pariwisata, meliputi:

- 1. Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi serta kualitas promosi yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh semua hal tentang produk
- 2. wisata yang ada dan siap jual;
- 3. Meningkatkan citra produk wisata daerah agar mampu bersaing dengan daerah-daerah wisata lainnya yang sudah berkembang di Indonesia;
- 4. Meningkatkan peran serta biro perjalanan wisata dan jasa usaha lainnya untuk menjual produk wisata daerah; dan
- 5. Meningkatkan "sadar wisata" dan sapta pesona di kalangan para pejabat, pengusaha dan masyarakat, agar tumbuh kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan dan kearifan lokal;
- 6. Meningkatkan prasarana dan sarana bagi sanggar seni yang ada agar tetap lestari dan berkesinambungan.

Pasal 17

Strategi Pengembangan Aksesibilitas, meliputi :

- 1. Meningkatkan akses antara daerah-daerah yang memiliki potensi wisatawan, menata sistem penunjuk jalan/rambu-rambu lalulintas yang mempermudah para wisatawan untuk mencapai obyek dan daya tarik wisata yang terdapat di daerah;dan
- 2. Mendorong pola komunikasi yang intensif terhadap pihak-pihak terkait dalam rangka percepatan pembangunan aksesibilitas pada ruas jalan Salubatu – Malabo – Tabang - Kabupaten Tana Toraja.
- 3. Mendorong, mengusahakan dan mempromosikan pengembangan prasarana dan sarana transportasi darat dan udara menuju obyek-obyek / daya tarik wisata dengan Pemerintah Pusat, SKPD atau OPD

Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamasa yang terkait.

Pasal 18

Strategi pengembangan prasarana untuk menunjang kegiatan pariwisata meliputi :

- 1. Perencanaan kebutuhan prasarana pariwisata yang meliputi : jalan, jembatan, air bersih, listrik, telepon dan toilet umum,peta objek wisata,alat ukur (GPS,Kompas dll)disesuaikan dengan arah perkembangan objek dan daya tarik wisata;
- 2. Pemenuhan kebutuhan prasarana pariwisata secara bertahap diusahakan pada objek-objek dan daya tarik wisata unggulan atau yang sudah berkembang yang seterusnya menyebar ke setiap objek dan daya tarik wisata lainnyameliputi pemenuhan kebutuhan objek wisata alam,wisata religi,wisata sejarah,wisata budaya,agrowisata dan objek wisata lainnya yang sedang dalam tahap pengembangan dan penataan;
- 3. Pengelolaan dan penataan kawasan pedesaan yang memiliki daya tarik untuk pengembangan kawasan desa wisata; dan
- 4. Penetapan legalitas kewenangan dan pungutan.

Pasal 19

Strategi pengembangan usaha, meliputi:

- 1. Mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata;
- 2. Membina pengusaha pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata;
- 3. Menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme kerja stakeholder pariwisata;
- 4. Bertahap dan konsisten (tahap eksplorasi, pengembangan, konsolidasi dan stagnat); dan
- 5. Polapariwisata inti rakyat dan kemitraan.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 20

Pelaksanaan RIPPARDA berbentuk program pembangunan pariwisata daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah,

perseorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha swasta yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan tuntutan pasar wisata.

Pasal 21

Program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi beberapa tahapan, yaitu:

- 1. Prioritas rencana tindak, meliputi:
 - a. Rencana tindak pengembangan prasarana dan sarana;
 - b. Pentahapan insentif dan disinsentif program investasi;
 - c. Pentahapan program investasi; dan
 - d. Prosedur kemitraan.
- 2. Prioritasprogram, meliputi:
 - a. Prioritas program penanganan; dan
 - b. Prioritas penanganan kawasan.
- 3. Tahapan pelaksanaan program, meliputi:
 - a. Indikasi program
 - b. Indikasi program pembangunan sektoral; dan
 - c. Indikasi program pembangunan.

Pasal 22

Rincian Program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam naskah RIPPARDA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 23

Pengendalian RIPPARDA dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pariwisata daerah;
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 25 ditugaskan kepada lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan;
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait.

Pasal 26

- (1) RIPPARDAdapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun guna mendapat bahan-bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARDA selanjutnya dan/atau disesuaikan dengansituasi dan kondisi maupun perkembangan yang akan terjadi setiap tahunnyadan yang akan datang;
- (2) Hasil peninjauan kembali RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Anggaran Pembiayaan RIPPARDA bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamasa;

- 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat;
- 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 4. Sumber lainnya yang sah, tidak mengikat dan dapat berupa kerjasama atau dipihakketigakan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

> Ditetapkan di Mamasa Pada tanggal 11September 2017

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa Pada tanggal 12 September 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

Drs.BENYAMIN YD, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 19641010 198303 1 005



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN KABUPATEN MAMASA SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa Kabupaten Mamasa mempunyai beraneka budaya dan potensi sumber daya alam yang memeliki prospek kedepan dalam menambah aset daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa dalam program pembangunan kepariwisataan, sesuai keunikan budaya dan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Kabupaten Mamasa sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Penetapan Kabupaten Mamasa Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran



2. Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427):

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Nomor 3470);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 3685) Nomor dengan sebagaimana telah diubah Undang-Undan Republik Indonesia Nomor 34 2000 Tahun tentang Perubahan **Undang-Undang** Atas Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Retribusi Daerah dan DAerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran



Republik Indonesia Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);

- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun Sistem Perencanaan 2004 tentang Pembangunan Nasional (Lembaran Indonesia Negara Republik Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun
 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun



- 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 2007 Tahun tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
- Instruksi Presiden Republik Indonesia
 Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata:
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
 Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Sulawesi Barat Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Daerah Sulawesi Barat 16);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN KABUPATEN MAMASA SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
- 2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- penyelenggara 4. Pemerintah Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Republik Indonesia Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa:
- 6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- 7. Destinasi Pariwisata adalah tempat dan tujuan perjalanan wisatawan;
- 8. Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi yang ditetapkan pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional;
- 9. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penata ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap



- ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan;
- 10 Konservasi Alam adalah pemeliharaan dan perlindungan . alam secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan agar tetap memiliki daya tarik untuk dikunjungi wisatawan secara berkelanjutan;
- 11 Konservasi Budaya adalah pemeliharaan dan . perlindungan serta pengembangan budaya daerah secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan perubahan nilai agar tetap menarik wisatawan secara berkelanjutan;
- 12 Masyarakat adalah seorang, kelompok orang termasuk . masyarakat hukum, adat atau badan hukum;
- 13 Pelaku Pariwisata adalah seorang atau himpunan/asosiasi profesi yang sama dengan tujuan melaksanakan fungsi kepariwisataan;
- 14 SDM adalah sumber daya manusia dibidang pariwisata . yang memiliki keahlian atau profesi dibidang kepariwisataan;
- Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan
 masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat;
- Masyarakat Pariwisata adalah anggota masyarakat yang
 sudah menggantungkan hidupnya dibidang usaha kepariwisataan secara terus menerus;
- 17 Cagar Alam adalah keadaan alam yang masih alami dan menarik untuk wisatawan;
- 18 Cagar Budaya adalah keadaan budaya budaya yang masih . asli tanpa pengaruh dari luar yang menarik untuk wisatawan.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan PeraturanGubernur ini, Kabupaten Mamasa ditetapkan sebagai daerah Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Sulawesi Barat.



ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama Asas dan Tujuan

Pasal 3

Rencana Penetapan Pengembangan Destinasi Pariwisata didasarkan atas asas :

- a. Pemanfaatan destinasi pariwisata unggulan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum,
- c. Pemerataan kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok desa atas manfaat pariwasata.

Pasal 4

Perencanaan Pembagunan Destinasi Pariwisata bertujuan:

- a. Terselenggaranya pemanfaatan fungsi destinasi pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan lingkungan;
- c. Terselenggaranya konservasi alam dan konservasi budaya secara teratur dan berkelanjutan;
- d. Terselenggaranya pembinaaan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terencanan dan berhasil guna;
- e. Tercapainya pemanfaaatan pengembangan destinasi pariwisata unggulan yang berkualitas untuk :
 - 1. mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
 - 2. mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia;
 - 3. mewujudkan perlindungan fungsi pemanfaatan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan;
 - 4. mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.



Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

Fungsi Rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan adalah:

- a. Sebagai bahan arahan bagi pembangunan pariwisata daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Sebagai bahan rujukan bagi penyusunan rencana program pembangunan pariwisata daerah dalam 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun;
- c. Sebagai sarana untuk mewujudkan keterkaitan dan kesinambungan perkembangan pembangunan pariwisata antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat;
- d. Sebagai rujukan/referensi Kabupaten dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten.

BAB III

KEGUNAAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Pasal 6

Kegunaan Rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan adalah:

- a. Bagi pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyusunan programprogram pembangunan 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan, dan program pembangunan tahunan secara terkoordinasi dan terintegrasi;
- b. Bagi Pemerintah Provinsi sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan tahunan;
- c. Bagi Pemerintah Kabupaten sebagai rujukan/referensi dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten;
- d. Bagi swasta dan masyarakat sebagai bahan referensi dalam program pengembangan destinasi pariwisata yang berkaitan dengan investor.

Pasal 7



Wilayah Perencanaan meliputi rencana pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah dengan batas sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek nasional.

Pasal 8

Jangka Waktu Rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Wilayah adalah 4 (empat) tahun dan sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali harus dilakukan peninjauan kembali materi rencana.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 9

Ruang Lingkup Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan adalah:

- a. Arahan pengelolaan kawasan lindung;
- b. Arahan pengelolaan kawasan budaya dan seni;
- c. Arahan pengembangan kawasan wisata unggulan;
- d. Arahan pengembangan kawasan;
- e. Arahan pengembangan sarana wilayah;
- f. Kebijakan tata guna tanah, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya;
- g. Arahan pengembangan pelestarian cagar alam;
- h. Arahan pengembangan dan pelestarian cagar budaya.

BAB V

RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN

Pasal 10

Kegunaan Rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan adalah:



- (1) Rencana pengembangan destinasi pariwisata unggulan merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan wilayah nasional dan pulau kedalam strategi dan struktur pemanfaatan wilayah Provinsi, yang meliputi :
 - a. tujuan pemanfaatan wilayah Provinsi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
 - b. struktur dan pola pemanfaatan ruang willayah provinsi;
 - c. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (2) Rencana tata pengembangan destinasi pariwisata unggulan wilayah provinsi berisi :
 - a. arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
 - b. arahan pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
 - c. arahan pengembangan sistem pusat pemukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya;
 - d. arahan pengembangan sistem pusat pemukinan pedesaan dan perkotaan;
 - e. arahan pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan;
 - f. arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan;
 - g. arahan kebijakan tata guna tanah, tatat guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
- (3) Rencana pengembangan destinasi pariwisata unggulan wilayah provinsi menjadi pedoman untuk :
 - a. perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah provinsi;
 - b. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat;
 - c. penataan ruang wilayah kabupaten yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan destinasi pariwisata unggulan.



(4) Jangka waktu rencana pengembangan destinasi pariwisata unggulan di Kabupaten Mamasa adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan;

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN

Pasal 11

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) arahan umum pengelolaan kawasan lindung adalah :

- a. Pemantapan batas dan status kawasan lindung sehingga keberadaannya lebih jelas, baik secara maupun hukum;
- b. Pemanfaatan kawasan lindung dapat dilakukan sejauh tidak mengurangi fungsi lindungnya;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian peninggalan budaya dan daya tarik wisata;
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan budaya;
- e. Kerjasama antar daerah kabupaten menjadi salah satu pendekatan utama dalam pengelolaan kawasan lindung yang meliputi lebih dari satu wilayah administrasi;
- f. Mengoptimalkan akselarasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

BAB VII

ANGGARAN

Pasal 9

Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan menggunakan:

- a. Anggaran Stimulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Stimulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII



PERUBAHAN RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN

Pasal 12

- (1) Rencana pengembangan destinasi pariwisata unggulan yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

> ditetapkan di : Mamuju Pada tanggal: 3 Juli 2008

GUBERNUR SULAWESI BARAT

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

diundangkan di : Mamuju Pada tanggal : 3 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd

H. M ARSYAD HAFID

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2008 NOMOR 43

